



PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG



RANCANGAN
RENCANA
KERJA (RENJA)
Tahun 2024

**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

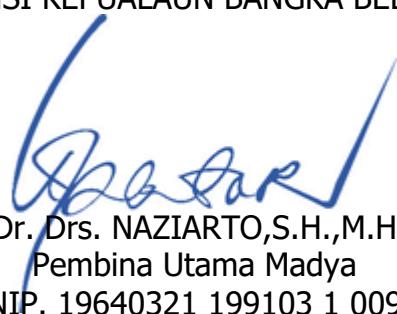
KATA PENGANTAR

Rancangan Rencana Kerja (Renja) merupakan Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Rancangan Rencana Kerja memberikan gambaran lebih mendetail tentang sasaran serta program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran tersebut, sehingga dalam dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dengan indikator output dan indikator outcomes yang akan dicapai..

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah. Sasaran yang akan dicapai melalui berbagai program dan kegiatan diukur dengan Indikator Kinerja untuk mengetahui tingkat capaian target yang ada dalam Rencana Kerja Tahunan tahun 2024

Demikianlah Rencana kerja ini dibuat, kami berharap agar Rancangan Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam memberikan pelayanan ke arah lebih baik lagi sesuai sasaran yang akan kita capai.

PANGKALPINANG, MARET 2023
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Dr. Drs. NAZIARTO, S.H., M.H
Pembina Utama Madya
NIP. 19640321 199103 1 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Isi Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	
8	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	55
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	60
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	61
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	100
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	100
3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah	100
3.3 Program dan Kegiatan	100
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	103
4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	104
BAB V PENUTUP	141

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam melaksanakan Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah dan selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 273 ayat 3 menyebutkan bahwa Rancangan rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Rancangan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 disusun melalui 4 (empat) tahapan yaitu pertama persiapan penyusunan Renja; kedua penyusunan rancangan Renja; ketiga pelaksanaan forum PD; dan keempat penetapan Renja. Tahap persiapan dimulai dengan menyusun rancangan keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang pembentukan tim penyusun Renja Sekretariat Daerah, orientasi mengenai Renja Sekretariat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Sekretariat Daerah dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Tahap kedua yaitu penyusunan rancangan Renja disusun mengacu pada rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024, mengacu pada RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023- 2026 serta Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026, dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra Sekretariat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun-tahun

sebelumnya. Renja Sekretariat Daerah juga disusun dengan harapan mampu memecahkan masalah yang dihadapi, menjawab isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang merupakan acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dan mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Tahapan ketiga yaitu membahas rancangan Renja Sekretariat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pembahasan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan menyelaraskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan usulan program dan kegiatan biro-biro; menajamkan indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah; menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing biro; menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang penyampaian rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024. Peserta Forum Perangkat Daerah Provinsi terdiri dari Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat daerah kabupaten/kota dan pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung.

Hasil kesepakatan pembahasan forum PD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang menghadiri forum PD untuk selanjutnya hasil kesepakatan ini dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja PD yang merupakan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penyempurnaan rancangan Renja dilakukan setelah RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan. Setelah disempurnakan kemudian diverifikasi untuk memastikan rancangan Renja telah sesuai dengan RKPD, untuk selanjutnya Renja Sekretariat Daerah tahun 2024 ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D). Sebagai lembaga perencanaan, Sekretariat Daerah diharapkan mampu membantu menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Selain itu perencanaan adalah suatu proses kegiatan pengambilan keputusan oleh pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhitungkan sumberdaya, IPTEK dan memperhatikan perkembangan global.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 akan dijadikan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerahnya, dimana mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor ... Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Untuk pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, dan untuk menjamin tercapainya sasaran diperlukan sinergi dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka maksud Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah dan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan pengawasan, pengendalaian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dialakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan, adapun tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah:

1. mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai institusi yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengordinasiaan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif,
2. menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
4. meningkatkan kualitas pelayanan public

1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja PD

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut di atas dibagi per bab sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

- 2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Program, Kegiatan Sub Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022, pencapaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2024, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sd. Tahun 2022 (tahun berjalan)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022–2026 maka Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Lainnya menetapkan sasaran dan target kinerja dengan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada dasarnya kegiatan Sekretariat Daerah adalah sebagai “Pembantu Gubernur dalam membuat Kebijakan”. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi Perangkat Daerah untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya. Berdasarkan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plan.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis Pembuat Kebijakan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang lebih mendorong Peningkatan Kebijakan di Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, Pengadaan Barang dan Jasa serta Tata Kelola Organisasi untuk membawa kearah yang lebih baik lagi.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pendukung urusan pemerintahan dalam hal ini Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang membantu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam membuat

kebijakan strategis menuju indeks reformasi birokrasi yang semakin baik dan meningkat , sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

Pelaksanaan evaluasi kinerja Tahun 2022 dilakukan terhadap capaian kinerja organisasi dengan menganalisis pelaksanaan kegiatan-kegiatan strategis dalam rangka mencapai sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Capaian kinerja organisasi dapat dilihat dari analisa pada tiap-tiap sasaran strategis. Adapun capaian kinerja Pelayanan pada Sekretariat Daerah seperti yang tertuang pada table II.2.1 sebagai berikut.

Tabel II.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah				48.394.471.715	50.942.622.648	53.489.753.780			44.857.635.463	48.258.596.839	38.020.661.672			92,69%	94,73%	71,08%		
	Pelayanan Administrasi Perkantoran				25.427.230.605	26.765.505.900	28.103.781.195			27.231.925.246	25.543.271.314	20.229.822.532			107,10 %	95,43%	71,98%		
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				18.575.761.110	19.553.432.748	20.531.104.385			14.122.244.847	20.413.800.617	15.676.124.408			76,03%	104,40 %	76,35%		
	Peningkatan Disiplin Aparatur				982.720.000	1.031.856.000	1.083.448.800			998.064.000	350.500.000	81.337.500			101,56 %	33,97%	7,51%		
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				559.400.000	600.000.000	630.000.000												
	Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Daerah				2.849.360.000	2.991.828.000	3.141.419.400			2.505.401.370	1.951.024.908	2.033.377.232			87,93%	65,21%	64,73%		
	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian				818.556.850	1.306.000.000	1.366.000.000			385.876.240	1.467.475.409	58.370.721			47,14%	112,36 %	4,27%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kerjasama di Provinsi Kepulauan Bangka				0	0	0												
	Monitoring dan Evaluasi pengembangan industri hilir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				0	0	0												

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Monitoring dan Evaluasi Sarana Prasarana Perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				0	0	0												
	Monitoring pengawasan supply dan demand barang dan jasa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				0	101.000.000	101.000.000												
	Monitoring dan Evaluasi Sistem Resi Gudang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				100.000.000	100.000.000	125.000.000			37.160.000	2.625.000				37,16%	2,10%			
	Koordinasi Pengawasan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				198.500.000	310.000.000	320.000.000			112.151.410	46.036.788	13.563.098			56,50%	14,85%	4,24%		
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi UKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				0	125.000.000	130.000.000			31.795.200	2.625.000				25,44%	2,02%			
	Monitoring,Evaluasi Promosi potensi daerah (EXPO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				117.856.050	220.000.000	230.000.000			80.128.920	74.579.800	2.625.000			67,99 %	33,90%	1,14%		
	Monitoring dan Evaluasi Analisis Ekonomi Makro di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				117.100.800	140.000.000	140.000.000			62.321.600	1.198.550.703	5.125.000			53,22 %	856,11 %	3,66%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				166.000.000	100.000.000	100.000.000			65.843.612	34.363.300				39,66%	34,36%			

	Forum Pengembangan Ekonomi				119.100.000	210.000.000	220.000.000			65.430.698	44.989.618	3.125.000			54,94%	21,42%	1,42%		
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung						2.625.000					2.625.000					100,00 %		
	Kegiatan Kerjasama IMT-GT Regional Sumatera dan Sekretariat IMT-GT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung						26.664.810					23.432.623					87,88%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Berkah Mart di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung						2.625.000					2.625.000					100,00 %		
	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam				644.924.775	882.500.000	916.625.000			165.307.296	6.437.300	7.875.000				25,63%	0,73%	0,86%	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Distribusi Penggunaan Subsidi listrik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				0	0	0												
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				153.324.000	162.500.000	162.500.000			87.750.221	1.600.000	2.625.000				57,23%	0,98%	1,62%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penataan serta Pengembangan Lahan Kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			100.000.000	100.000.000	100.125.000				1.512.500	2.625.000				1,51%	2,62%		
	Monitoring dan evaluasi Perizinan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			50.000.000	70.000.000	104.000.000				1.812.400					2,59%			
	Kajian Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan Fungsi Balai Benih Pertanian, Kelautan dan Perikanan			0	0	0												

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Komoditi Pangan				137.765.700	150.000.000	150.000.000			77.557.075	1.512.400	2.625.000			56,30%	1,01%	1,75%		
	Koordinasi dan Monitoring Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				0	0	0												
	Monitoring dan Evaluasi Tim Terpadu Penanganan masalah Penambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				203.835.075	400.000.000	400.000.000												

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi komoditi lada di Prov.Kep.Babel				0	0	0													
	Koordinasi Pemerataan dan percepatan penggunaan energi alternatif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				0	0	0													
	Program Peningkatan Koordinasi Bumd, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya				2.350.877.200	3.260.000.00	2.200.000.00			481.432.826	399.309.341	37.875.000				20,48%	12,25%	1,72%		
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi kajian potensi investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				0	0	0													

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung				762.011.400	1.500.000.00	200.000.000			267.932.428	26.528.600				35,16%	1,77%			
	Koordinasi Program CSR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				117.100.800	150.000.000	200.000.000			61.594.482	149.716.960	2.625.000			52,60%	99,81%	1,31%		
	Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				100.000.000	120.000.000	220.000.000			40.645.741	1.000.000	32.625.000			40,65%	0,83%	14,83%		
	Penyusunan Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				300.000.000	320.000.000	340.000.000												

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kajian dan Penyusunan Perlindungan Benda Cagar Budaya atau Benda diduga cagar budaya			300.000.000	320.000.000	340.000.000				138.535.993					0,00%	43,29%			
	Kajian Strategis Destinasi Wisata Baru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			100.000.000	120.000.000	140.000.000				57.730.235					57,73%				
	Rakor Teknis Tata Kelola BUMD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			99.100.000	150.000.000	160.000.000				53.529.940	83.527.788				54,02%	55,69%			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Penyusunan SOP BUMD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			349.845.000	350.000.000	360.000.00													
	Pemetaan Potensi Investasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			222.820.000	230.000.000	240.000.00													
	Kegiatan Pengembangan Kemitraan BUMD						3.750.000,00								2.625.000			70,00%	
	Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBN			475.514.731	1.407.072.623	1.208.633.140				303.465.842	41.326.524				63,82%	2,94%			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sistem e-Monep APBN			257.308.000	436.643.000	429.852.588				173.158.600	23.736.524				67,30%	5,44%			
	Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan yang bersumber dari APBN			161.256.731	243.864.764	280.444.479				99.698.458	17.590.000				61,83%	7,21%			

	Koordinasi Kebijakan APBN				56.950.000	161.200.000	185.380.000			30.608.784					53,75%				
	Penyusunan Pergub / Revisi Pergub tentang Pengendalian Dana APBN				0	150.000.000	0												

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Penyusunan Kebijakan Implementasi Jaringan Aplikasi E-Monep APBN			0	165.000.000	0													
	Pemuthahiran Aplikasi E-Monep APBN			0	0	0													
	Penggunaan Aplikasi E-Monep APBN			0	250.364.859	312.956.073													
	Program Peningkatan Administrasi Kewilayahana				5.385.583.757	700.574.00	5.735.910.00			279.036.511	1.677.192.804	73.572.800				5,18%	239,40%	1,28%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Sengketa Pertanahan di kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			0	81.300.000	85.300.000													
	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung			108.400.000	118.345.000	124.260.000				107.444.000	511.024.920	19.493.400			99,12%	431,81%	15,69%		
	Kegiatan Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			59.244.500	108.129.000	113.500.000				38.275.950					64,61%				

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Kegiatan Inventarisasi Pendataan, Penamaan, Dan Pembakuan Unsur Rupabumi (unsur buatan)				124.370.500	157.000.000	165.300.000			96.380.086					77,49%				
	Kegiatan Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar Batas daerah				48.806.282	105.000.000	110.250.000			36.596.475					74,98%				
	Kegiatan Perapatan dan Pemasangan Pilar Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				94.762.475	130.800.000	137.300.000			340.000					0,36%				
	Pengadaan Lahan				4.950.000.000	0	5.000.000.000												

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Perencanaan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Internal Biro Pemerintahan.					824.106.725					817.076.004					99,15%			
	Pembinaan Penanganan Masalah Konflik Pertanahanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.					104.100.000					87.167.560					83,73%			
	Penyusunan Sistem Informasi Data Administrasi Kewilayahannya.					44.440.000	11.095.400				4.745.000	11.095.400				10,68%	100,00 %		
	Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Rupabumi.					23.918.000					9.620.000					40,22%			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	1	Target Renstra	Perangkat Daerah Tahun Ke-	4	5	1	Realisasi	Capaian Tahun ke-	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Rasio Capaian pada Tahun ke-
a																						
	Penegasan Batas Daerah.					313.159.000	43.668.000				247.559.320	42.984.000										79,05% 98,43%
	Program Pengembangan Otonomi Daerah					2.638.074.000	2.772.705.000				741.778.578	890.469.627										28,12% 32,12%
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKpj)					327.905.000	347.905.000				119.637.500	448.816.613										36,49% 129,01 %
N o	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-							
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Kunci, serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017				351.810.000	367.500.000	386.500.000			366.541.760	223.520.935					104,19 %	60,82%					
	Penyusunan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				276.971.408	467.000.000	490.000.000			270.029.102	157.824.339					97,49%	33,80%					
N o	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-							
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	Kegiatan Desk Pilkada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				143.257.000	262.500.000	275.100.000			139.929.889						97,68%						
	Kegiatan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan KDH dan WKDH				116.415.704	210.000.000	220.000.000			108.585.850						93,27%						

	Kegiatan Implementasi Proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota				0	157.000.000	165.375.000												
--	--	--	--	--	---	-------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Pelayanan Perizinan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Ketua/Anggota DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung ke Luar Negeri			74.753.565	157.000.000	165.375.000			71.195.000	25.945.683	95.046.790			95,24%	16,53%	57,47%			
	Rapat koordinasi optimalisasi penyelenggaraan urusan/kewenangan dan kebijakan Otonomi Daerah di Prov. Kep. Bangka Belitung			116.015.704	229.587.000	241.100.000			115.537.239					99,59%					
	Rapat koordinasi penerapan pelaksanaan NSPK di Prov. Kep. Bangka Belitung			101.165.704	229.582.000	241.100.000			99.056.702					97,92%					
No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Kegiatan perencanaan, evaluasi dan penyusunan laporan internal Biro Pemerintahan			0	105.000.000	110.250.000													
	Workshop Penataan dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			102.310.000	125.000.000	130.000.000			101.583.356					99,29%					
	Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan/Kewenangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.				77.200.000					46.501.900					60,24%				

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pilpres 2019.				6.200.000					6.200.000					100,00 %				
	Verifikasi Berkas Calon Anggota DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.				88.860.000					84.552.140					95,15%				
	Optimalisasi Penerapan dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.				78.940.000					77.596.081					98,30%				

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Kegiatan administrasi penatausahaan biro pemerintahan				350.238.666					346.606.224					0,00%				
	Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah				1.639.284.704	1.665.551.000	1.726.311.000			1.470.581.335	666.498.578	1.713.010.579			89,71%	40,02%	99,23%		
	Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				220.949.000	382.389.000	401.508.000			108.146.940	328.603.278	278.174.076			48,95%	85,93%	69,28%		
	Kegiatan Partisipasi Kontribusi luran dan Keikutsertaan dalam Rakor/Rakernas APPSI				101.320.000	230.464.000	241.980.000			115.197.110	90.825.000	94.450.000			113,70 %	39,41%	39,03%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Kegiatan Partisipasi Kontribusi luran dan Keikutsertaan dalam Rapat Kerja BKS Provinsi Kepulauan				137.765.704	260.284.000	273.290.000			150.000.000	150.260.000				108,88 %	57,73%			
	Kegiatan Verifikasi dan Validasi bantuan pemerintah provinsi kepada Pemerintah/pemerintahan daerah lainnya dan BUMD			0	78.629.000	82.560.000				13.545.000	1.860.000				17,23%	2,25%			
	Kegiatan Pengembangan Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama				197.400.000	144.411.000	151.631.000			196.445.495	55.369.300	1.338.526.503			99,52%	38,34%	882,75 %		
No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Kegiatan Inventarisasi potensi kerjasama				93.150.000	119.374.000	125.342.000			90.986.722	11.558.500				97,68%	9,68%			
	Kegiatan Penyelarasan program pemerintah daerah dan pusat				888.700.000	450.000.000	450.000.000			809.805.068	16.337.500				91,12%	3,63%			
	Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan				8.394.550.000	12.728.933.000	11.595.068.000			7.429.257.519	8.717.697.220	1.165.206.927			88,50%	68,49%	10,05%		
	Pembinaan Mental dan Spiritual Masyarakat provinsi Kep.Bangka Belitung				1.335.332.000	1.502.648.000	1.552.648.000			1.311.814.146	1.910.470.871	466.400.998			98,24%	127,14 %	30,04%		
No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Peningkatan Kehidupan Beragama pada Bulan Ramadhan				616.530.000	675.100.000	725.100.000			524.025.500	470.454.000	463.984.000			85,00%	69,69%	63,99%		
	Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji				903.270.000	998.600.000	1.048.600.000			703.356.171	545.075.000	142.383.329			77,87%	54,58%	13,58%		

	Pendampingan Jamaah Haji Prov. Kep. Bangka Belitung			488.088.000	554.080.000	604.080.000			477.761.010	468.950.000	86.063.600			97,88%	84,64%	14,25%		
	Pembiayan Transportasi Domestik Jemaah Haji			3.170.920.000	3.250.000.000	3.300.000.000			2.912.188.990	3.354.413.792	6.375.000			91,84%	103,21 %	0,19%		
	Persiapan Musabaqah Hafidz Qur'an Internasional			500.000.000	2.372.040.000	2.422.040.000			345.107.266					69,02%				

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Pembinaan dan Pemberangkatan Kafilah STQ Nasional				1.380.410.000	1.506.600.000	1.556.600.000			1.155.004.436	763.188.457				83,67%	50,66%			
	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama				0	336.000.000	386.000.000												
	Pekan Olah Raga dan Seni antar Pondok Pesantren Tingkat Daerah Prov. Kep. Babel				0	534.965.000	0				398.516.000					74,49%			
	Pembinaan dan Pemberangkatan Kontingen POSPENAS				0	998.900.000	0				806.629.100					80,75%			
	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, KB, Pemuda dan Pariwisata				1.323.400.000	2.010.920.000	2.160.920.000			969.398.600	791.989.000	315.246.000			73,25%	39,38%	14,59%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Pelaksanaan Kegiatan TP UKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				297.820.000	384.090.000	434.090.000			220.120.500	112.335.200				73,91%	29,25%			
	Peningkatan Kecintaan Bermasyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				1.025.580.000	1.096.630.000	1.146.630.000			749.278.100	679.653.800	315.246.000			73,06%	61,98%	27,49%		
	Koordinasi Bidang Pendidikan, KB, Pemuda dan Pariwisata				0	530.200.000	580.200.000												

	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi				535.189.000	1.067.422.000	1.217.422.000			317.196.650	78.461.400	206.104.700			59,27%	7,35%	16,93%		
--	--	--	--	--	-------------	---------------	---------------	--	--	-------------	------------	-------------	--	--	--------	-------	--------	--	--

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Rapat Bagian Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi			0	430.233.000	480.233.000				58.346.400					13,56%				
	Monitoring dan evaluasi dana bantuan sosial dan hibah			333.985.000	383.985.000	433.985.000			188.585.600	9.125.000	110.215.000				56,47%	2,38%	25,40%		
	Evaluasi dan Analisi Proposal Bansos dan Hibah			201.204.000	253.204.000	303.204.000			128.611.050	10.990.000	95.889.700				63,92%	4,34%	31,63%		
	Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan			1.912.323.600	3.420.000.000	3.710.000.000			1.711.488.044	206.849.700	817.953.834				89,50%	6,05%	22,05%		
	Penyusunan Propemperda Dan Rancangan Peraturan Daerah			959.843.600	1.500.000.000	1.550.000.000			896.008.774	83.325.000	415.140.934				93,35%	5,56%	26,78%		
	Penyusunan Produk Hukum Daerah			567.480.000	500.000.000	600.000.000			526.255.384	118.623.500	230.727.682				92,74%	23,72%	38,45%		
	Penyusunan Naskah Hukum Lainnya			67.220.000	150.000.000	170.000.000			65.753.457	600.000	24.509.100				97,82%	0,40%	14,42%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Pembinaan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota			0	420.000.000	440.000.000								73.414.364				16,69%	
	Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			317.780.000	400.000.000	430.000.000			223.470.429	4.301.200	74.161.754				70,32%	1,08%	17,25%		
	Simplifikasi Regulasi Produk Hukum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota			0	160.000.000	180.000.000													

	Rapat Koordinasi Program Pembentukan Peraturan Daerah				0	140.000.000	170.000.000										
	Bimbingan Teknis Legal Drafting				0	150.000.000	170.000.000										

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Program Peningkatan Pelayanan Hukum Pemerintah Daerah				955.806.626	1.816.000.000	1.970.046.250			728.136.127	189.585.700	192.965.950			76,18%	10,44%	9,79%		
	Penyelesaian Perselisihan/Sengketa Perdata antara Pemda dengan Orang/Masyarakat secara Litigasi atau Non Litigasi				170.370.000	300.000.000	320.000.000			126.469.039	19.660.000	44.033.600			74,23%	6,55%	13,76%		
	Penyelesaian Sengketa TUN akibat Pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemda				191.528.000	300.000.000	320.000.000			125.137.088	84.693.700	72.147.800			65,34%	28,23%	22,55%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Pembinaan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Akibat Pelaksanaan Produk Hukum Daerah dan Kebijakan Pemda di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				93.865.626	150.000.000	170.000.000			85.266.600	4.609.000	17.709.500			90,84%	3,07%	10,42%		
	Pembinaan Pelaksanaan RANHAM di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				94.444.000	210.000.000	240.000.000			86.619.800	5.490.000	17.475.050			91,72%	2,61%	7,28%		
	Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin oleh Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				156.966.000	230.000.000	260.000.000			106.676.700	75.133.000	41.600.000			67,96%	32,67%	16,00%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Penyuluhan Hukum di 7 Wilayah Kabupaten/Kota				248.633.000	350.000.000	370.000.000			197.966.900					79,62%				
	Penyuluhan HAM				0	136.000.000	140.046.250												
	Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Akibat Pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemerintah Daerah				0	140.000.000	150.000.000												
	Program Pengembangan Dokumentasi Hukum Dan Informasi Hukum				750.391.500	1.510.000.000	1.670.000.000			467.324.563	1.277.898.260	20.890.800			62,28%	84,63%	1,25%		
	Pengelolaan dan Pengembangan JDIH				482.138.000	600.000.000	650.000.000			364.166.560	1.277.898.260	3.000.000			75,53%	212,98 %	0,46%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Hukum				61.658.000	85.000.000	90.000.000			35.978.890					58,35%				
	Penyusunan Katalog Perda dan Pergub dan Komplilasi Perda dan Pergub				69.125.500	85.000.000	90.000.000			67.179.113					97,18%				
	Penyusunan Abstar Produk Hukum Daerah				0	120.000.000	140.000.000												
	Penyusunan Arsip Produk Hukum Daerah				0	85.000.000	90.000.000												
	Pembinaan Pelaksanaan JDIH Kabupaten/Kota				0	0	0												
	Sosialisasi Perda				0	95.000.000	110.000.000												

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Rakor Biro Hukum dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				137.470.000	170.000.000	190.000.000			120.967.425	39.049.700	17.890.800			88,00%	22,97%	9,42%		
	Publikasi Produk Hukum Daerah di Media				0	0	0												
	Bimtek Sistem Informasi Hukum				0	140.000.000	160.000.000												
	Rakor JDIH Provinsi Dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				0	130.000.000	150.000.000												
	Program Perencanaan Setda				301.467.968	428.313.000	492.559.950			160.507.629	49.724.600	46.765.600			53,24%	11,61%	9,49%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah				149.599.950	202.610.000	233.001.500			70.064.930	23.345.350	23.416.550			46,83%	11,52%	10,05%		
	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat Daerah				151.868.018	225.703.000	259.558.450			90.442.699	26.379.250	23.349.050			59,55%	11,69%	9,00%		
	Program Pengendalian Pembangunan Daerah				779.993.020	1.549.651.606	1.780.849.347			604.834.881	744.141.427				77,54%	48,02%			
	Pengendalian Percepatan Pembangunan di Provinsi Kabupaten/Kota				108.080.000	380.450.000	437.517.500			79.192.073	744.141.427				73,27%	195,60 %			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Peningkatan Fungsi Sistem Monitoring TEPPRA (SISMONTEP) Provinsi Kabupaten/Kota			578.951.855	662.436.606	761.802.097			381.482.888						65,89%				
	Peningkatan Pengendalian Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			92.961.165	331.765.000	381.529.750			56.795.500						61,10%				
	Koordinasi Penetapan Target Fisik dan Keuangan APBD Provinsi			0	175.000.000	200.000.000			87.364.420										
	Program Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Apbd			501.326.670	1.982.884.194	1.959.232.094			134.477.490	121.879.500					26,82%	6,15%	5,17%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Peningkatan Fungsi Sistem E-Monep APBD			0	602.328.194	627.328.194				26.202.000					4,35%				
	Koordinasi Penyempurnaan Aplikasi e-Monep APBD			398.674.000	538.326.000	619.074.900			94.091.990						23,60%				
	Kebijakan Monitoring Evaluasi APBD			102.652.670	152.650.000	175.547.500			40.385.500						39,34%				
	Penyusunan Kebijakan dan Implementasi Jaringan Aplikasi e-Monev berkelanjutan			0	0	250.000.000													
	Penggunaan Aplikasi E-Monep APBD			0	0	0													
	Peningkatan Capaian Realisasi APBD			0	225.620.000	0				76.175.000					33,76%				
	Peningkatan Fungsi Sismontepa APBD Provinsi, Kab/Kota			0	463.960.000	287.281.500				19.502.500					4,20%				
	Program Pengembangan Data Informasi Layanan			554.899.000	1.446.989.500	1.591.688.450			323.373.394	889.597.497	82.250.300				58,28%	61,48%	5,17%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Pengadaan																			
	Peningkatan penerapan data dan informasi layanan				211.370.000	533.841.000	587.225.100			119.594.454	8.100.000				56,58%	1,52%			
	Pengelolaan data dan informasi				125.128.000	259.050.000	284.955.000			46.860.950	13.665.200	18.247.200			37,45%	5,28%	6,40%		
	Peningkatan Administrasi Ketatausahaan				112.637.000	411.235.000	452.358.500			71.708.770	28.437.600	44.501.100			63,66%	6,92%	9,84%		
	Peningkatan Pelayanan Publik				105.764.000	242.863.500	267.149.850			85.209.220	13.665.200	19.502.000			80,57%	5,63%	7,30%		
	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa				2.337.898.000	5.034.568.000	5.538.024.800			1.806.991.211	1.030.944.311	927.437.874			77,29%	20,48%	16,75%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Peningkatan Fungsi Pelayanan ULP																			
	Peningkatan Fungsi Pelayanan ULP				1.927.350.000	3.540.240.000	3.894.264.000			1.602.033.069	891.787.698	927.437.874			83,12%	25,19%	23,82%		
	Peningkatan Pembinaan Pengadaan barang dan Jasa				183.145.000	495.429.000	544.971.900			98.654.959	66.150.094				53,87%	13,35%			
	Peningkatan pelayanan perencanaan Pengadaan barang dan jasa				111.378.000	404.888.000	445.376.800			45.669.800					41,00%				
	Pencegahan dan Penanganan Pengaduan				116.025.000	594.011.000	653.412.100			60.633.383	73.006.519				52,26%	12,29%			
	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				2.539.128.000	5.020.020.500	5.522.022.550			1.814.816.030	1.653.776.602	605.590.734			71,47%	32,94%	10,97%		
	Peningkatan Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1.195.925.000	2.116.136.000	2.327.749.600			1.058.917.331	952.296.951	476.654.850			88,54%	45,00%	20,48%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Peningkatan Layanan dan Dukungan Pengadaan Secara Elektronik				459.493.000	962.824.500	1.059.106.950			256.749.433	138.556.488				55,88%	14,39%			
	Peningkatan Pelayanan dan Registrasi dan Verifikasi				308.280.000	781.825.000	860.007.500			94.816.455	98.134.063				30,76%	12,55%			
	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				575.430.000	1.159.235.000	1.275.158.500			404.332.811	464.789.100	128.935.884			70,27%	40,09%	10,11%		
	Program Peningkatan Dan Pengembangan Kelembagaan Serta Analisisi Jabatan				2.047.186.525	952.670.000	1.067.670.000			388.834.028	244.708.431	245.772.197			18,99%	25,69%	23,02%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				81.146.000	132.670.000	142.670.000			51.978.830					64,06%				
	Evaluasi Kelembagaan UPTD/Cabdin Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				14.070.000,00					13.155.000					93,50%				
	Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				37.114.500,00					32.553.478	29.946.911				87,71%				

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis/Cabang Dinas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung						46.078.080							45.600.748				98,96%	
	Pembinaan uraian tugas perangkat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				133.810.000														
	Pembinaan kelembagaan UPTD/UPTB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				74.827.500	160.000.000	180.000.000			49.076.700						65,59%			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	Sinkronisasi fasilitasi penataan kelembagaan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				87.240.000															
	Penyusunan Rumpun Jabatan Fungsional umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016				170.000.000															
	Pembinaan kelembagaan perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota				83.475.000	150.000.000	175.000.000			11.582.000	1.510.000	51.632.400				13,87%	1,01%	29,50%		
	penyusunan profil aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				89.765.000															

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Evaluasi jabatan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				74.751.945	160.000.000	170.000.000			72.772.468					97,35%				
	Bimbingan teknis penyusunan standar kompetensi teknis Pegawai Negeri Sipil pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				243.553.000														

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Penyusunan standar kompetensi teknis Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				113.207.580	130.000.000	170.000.000			81.816.000					72,27%				
	Validasi Analisis Beban Kerja Jabatan Aparatur Sipil negara pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.				201.805.000														

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Validasi Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				59.950.000,00					48.740.239					81,30%				
	Validasi dan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.				233.510.000					46.464.829	35.692.000								
	Pembinaan dan analisa jabatan dan beban kerja				195.087.500	220.000.000	230.000.000			121.608.030					62,34%				

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Penyusunan Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum dan Fungsional tertentu Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				265.008.000														
	Program Peningkatan Dan Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah				2.868.168.893	4.115.000.000	3.922.000.000			375.650.482	191.195.562	238.172.418			13,10%	4,65%	6,07%		
	Penyusunan Profil Aparatur jabatan struktural				115.000.000	145.000.000	165.000.000												
	Forum Sekretaris Daerah Prov.babel				50.241.497	175.000.000	185.000.000			29.347.500	10.294.350				58,41%	5,88%			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Pembinaan dan Evaluasi Profil Aparatur UPT Pemprov Babel				33.615.875	145.000.000	175.000.000			22.764.000					67,72%				
	Pengadaan aplikasi e-Sakip/penerapan aplikasi e-Sakip				150.000.000	175.000.000	175.000.000												
	Bimbingan Teknis penyusunan Laporan kinerja, perjanjian kinerja dan rencana aksi kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				67.424.000	215.000.000	225.000.000			46.092.540	72.981.919				68,36%	33,95%			
	Pembinaan laporan kinerja				175.000.000	200.000.000	225.000.000												

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Bimbingan teknis E-LHKPN				106.301.000	165.000.000	187.000.000			87.578.650					82,39%				
	Pembangunan zona integritas				125.000.000	150.000.000	175.000.000												
	Rapat koordinasi evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah				127.570.000	200.000.000	220.000.000			80.799.330					63,34%				
	Bimbingan teknis pengisian LHKPN				112.500.000	175.000.000	180.000.000												
	Penyusunan laporan kinerja tahunan dan perjanjian kinerja tahunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				75.331.000	175.000.000	225.000.000			62.002.677	19.965.000				82,31%	11,41%			
	Penyusunan pedoman indikator kinerja utama				225.000.000	250.000.000	0												

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Penyusunan Pedoman Pengembangan Penerapan Budaya Kerja ASN				250.000.000	270.000.000	275.000.000												
	Rakor pencapaian indikator kinerja utama				125.000.000	150.000.000	175.000.000												
	Penyusunan database capaian kinerja individu				225.000.000	250.000.000	0												
	Penyusunan standar capaian kinerja individu ASN				250.000.000	270.000.000	275.000.000				20.448.200					7,57%			
	Penyusunan standar reward capaian kinerja individu dan perangkat daerah				250.000.000	270.000.000	275.000.000												

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Pembinaan standar manajemen mutu pada OPD, Cabdin dan UPT di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung				63.309.781	270.000.000	275.000.000			66.116.593	24.382.400				24,49%	8,87%			
	Forum Staf Ahli Kepala Daerah				175.000.000	185.000.000	195.000.000												
	Pembinaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah				72.140.240	120.000.000	140.000.000			47.065.785	1.389.500				65,24%	1,16%			
	Bimbingan teknis penyusunan capaian kinerja individu ASN di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung				94.735.500	160.000.000	175.000.000												

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Manajemen Perubahan						98.178.800					97.137.538					98,94%		
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja						59.060.050					56.564.052					95,77%		
	Data dan Informasi Kinerja						61.019.237					60.088.428					98,47%		
	Program Peningkatan Dan Pengembangan Tata Laksana Pemerintah Daerah				852.840.935	1.900.000.000	2.035.000.000			499.237.123	1.214.630.908	307.169.845			58,54%	63,93%	15,09%		
	Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				85.119.480	170.000.000	190.000.000			66.988.810	134.466.370	10.755.798			78,70%	79,10%	5,66%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	Pembinaan pelaksanaan pelayanan publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				48.999.680	150.000.000	200.000.000			28.105.100	750.000	89.936.261			57,36%	0,50%	44,97%			
	Rapat koordinasi Biro/Bagian Organisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				88.991.825	170.000.000	190.000.000			61.050.090	18.474.390				68,60%	10,87%				
	Peningkatan administrasi ketatausahaan				72.493.150	285.000.000	300.000.000					881.499.851	149.557.804				309,30 %	49,85%		
	Bimtek penyusunan proposal dan pelatihan admin kompetisi inovasi pelayanan publik				97.924.275	300.000.000	300.000.000			79.743.279	43.929.889	20.963.555			81,43%	14,64%	6,99%			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Audit Surveillance ISO 9001:2008 menuju Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Samsat Sungailiat dan UPTSP				149.319.550	200.000.000	200.000.000												
	Peningkatan Pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				100.324.275	200.000.000	200.000.000			77.883.764	115.650.408				77,63%	57,83%			
	Roadmap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				123.155.325	275.000.000	290.000.000			77.026.700	18.960.000				62,54%	6,89%			
	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik				86.513.375	150.000.000	165.000.000			57.779.900	900.000	35.956.427			66,79%	0,60%	21,79%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Penyelenggaraan standar pelayanan minimal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				59.354.750,00					50.659.480					85,35%				
	Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan, Dokumentasi, Publikasi Media dan IT				2.193.142.400	3.503.023.340	4.020.448.841			1.878.528.389	1.366.525.000	167.550.000			85,65%	39,01%	4,17%		
	Publikasi Media Massa / Cetak				1.467.700.000	2.242.500.000	2.578.875.000			1.409.825.139	796.375.000	117.765.000			96,06%	35,51%	4,57%		
	Publikasi Media Elektronik/IT				299.942.025	458.425.765	527.189.630			184.990.000	312.500.000	40.875.000			61,68%	68,17%	7,75%		
	Pendokumentasian dan Belanja Spanduk/Baleho				163.901.900	260.899.580	300.034.517			123.760.750	153.975.000	8.910.000			75,51%	59,02%	2,97%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	Penerbitan Majalah / Buletin Pemerintah Provinsi				241.827.425	378.407.385	435.168.492			159.952.500	103.675.000	-			66,14%	27,40%				
	Media Gathering				0	52.195.000	60.024.250													
	Workshop Humas Bidang Media Elektronik dan IT				19.771.050	30.315.610	34.862.952			11.031.000					55,79%					
	Workshop Bidang Kehumasan				0	80.280.000	84.294.000													
	Program Peningkatan Pelayanan Protokoler				162.698.250	535.354.305	585.657.450			48.870.000	180.074.100	87.514.147				30,04%	33,64%	14,94%		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				66.562.500	78.846.875	90.673.906			48.870.000	79.070.000	9.957.500			73,42%	100,28 %	10,98%			
	Workshop Bidang Keprotokolan				96.135.750	221.802.225	225.072.558					101.004.100				45,54%				

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Layanan Tamu Pemerintah dan Negara				0	84.705.205	97.410.986												
	Peningkatan Fungsi Keprotokolan				0	150.000.000	172.500.000						77.556.647				44,96%		
	Program Peningkatan Publikasi, Pengumpulan dan Penyiaran Informasi				1.224.371.325	1.975.838.255	2.272.213.993			1.059.488.769	1.339.360.061	169.492.761				86,53%	67,79%	7,46%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				183.992.200	285.174.930	327.951.170			171.205.000	188.133.500	14.602.500			93,05%	65,97%	4,45%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Pengumpulan, Penyaringan informasi dan Publikasi Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Dalam dan Luar Daerah di rubah menjadi Pengumpulan Informasi, Layanan Kehumasan, dan keprotokolan				259.830.650	396.076.330	455.487.780			156.625.159	527.920.661	53.825.170			60,28%	133,29 %	11,82%		
	Penguatan Fungsi Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi				230.918.550	362.861.110	417.290.276			144.718.910	19.347.400	20.998.710			62,67%	5,33%	5,03%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Layanan Kehumasan dan keprotokolan				533.821.375	792.152.775	910.975.691			578.155.000	603.958.500	74.775.700			108,30 %	76,24%	8,21%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Peningkatan Kualitas SDM dan Koordinasi Kehumasan dan Keprotokolan				15.808.550	39.573.110	45.509.076			8.784.700		5.290.681			55,57%		11,63%		
	Penyediaan Pakaian Khusus Lapangan Humas dan Protokol				0	100.000.000	115.000.000												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							185.000.000	203.500.000					##### #					34,32%
								##### ##	##### ##					##### #					81,76%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							185.000.000	203.500.000					##### #					34,32%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							166.000.000	180.000.000				##### #					23,74%	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD																		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							19.000.000	23.500.000				##### #					126,75%	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							##### ##	54.202.275.413				##### #					82,94%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							##### ##	54.202.275.413				##### #					82,94%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD																		
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							200.000.000	200.000.000				#####	#				73,05%	
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							200.000.000	200.000.000				#####	#				73,05%	
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah																		
	Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah																		
	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah																		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah																		
	Sub Kegiatan Pengolahan Data Retribusi Daerah																		
	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Retribusi Daerah																		
	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							310.000.000	341.000.000					-					0,00%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								160.000.000	176.000.000				-					0,00%
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
	Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiu																		
	Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas																		
	Sub Kegiatan Pemindahan Tugas ASN																		
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							150.000.000	165.000.000				-					0,00%	
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							##### ##	13.820.311.405				##### #					83,59%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							788.511.638	867.362.800				##### #					21,49%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							75.000.000	82.500.000				##### #					26,43%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							75.000.000	82.500.000				-					0,00%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor							65.096.000	71.575.900				##### #					99,95%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							357.378.980	393.116.880				##### #					68,55%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan							169.953.000	186.948.300				##### #					32,40%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material							400.000.000	410.000.000				##### #					83,53%	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu							5.052.800.000	6.850.000.000				##### #					113,47%	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							4.433.006.840	4.876.307.525				##### #					65,89%	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							2.500.000.000	2.800.000.000				##### #					78,39%	
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							1.800.000.000	2.000.000.000				##### #					74,71%	
	Pengadaan Alat Besar																		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																		
	Pengadaan Mebel																		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							700.000.000	800.000.000				##### #						87,85%
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							##### ##	14.613.157.290				##### #						89,34%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							4.941.500.000	5.435.650.000				##### #						0,44%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							4.441.000.000	4.885.100.000				##### #						66,10%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							1.575.200.000	1.832.220.000				##### #						71,79%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							2.236.533.900	2.460.187.290				##### #						344,26%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							##### ##	13.660.818.446				##### #						62,36%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							3.280.173.150	3.608.190.465				##### #						20,83%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							2.188.164.150	2.406.980.565				##### #						61,01%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel								150.000.000	165.000.000				##### #					28,61%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								1.883.800.000	2.072.180.000				##### #					17,96%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								4.254.616.260	4.680.077.886				##### #					103,82%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								662.172.300	728.389.530				##### #					140,00%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah																		
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							1.642.246.217	1.780.000.000				##### #						94,64%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							245.046.217	265.000.000				##### #						98,16%
	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaihan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							82.200.000	90.000.000				##### #						26,76%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							65.000.000	75.000.000				##### #						64,04%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							1.250.000.000	1.350.000.000				##### #						100,00%
	Kegiatan Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah							2.051.800.723	2.100.000.000				##### #						80,77%
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah							583.709.644	600.000.000				##### #						141,39%
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah							278.137.296	300.000.000				##### #						204,74%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah							1.189.953.783	1.200.000.000				##### #						22,06%
	Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan							72.850.000	80.000.000				##### #						1652,97 %
	Sub Kegiatan Penyiapan Materi Pimpinan							72.850.000	80.000.000				##### #						1652,97 %
	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan																		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan							1.444.794.000	1.565.789.267				##### #					56,83%	
	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara							945.744.000	1.000.000.000				##### #					2,48%	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
	Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan							499.050.000	565.789.267				##### #					159,84%	
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI							805.705.855	1.000.000.000				##### #					46,81%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan							265.000.000	345.000.000				##### #					47,09%	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi							80.000.000	100.000.000				##### #					40,68%	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota							90.000.000	120.000.000				##### #					48,08%	
	Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan							95.000.000	125.000.000				##### #					51,57%	
	Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi												##### #					46,67%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
								540.705.855	655.000.000				#						
Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi								95.000.000	125.000.000				##### #					39,65%	
Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja								90.000.000	110.000.000				##### #						39,71%
Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja								90.000.000	110.000.000				##### #						35,07%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan								50.000.000	60.000.000				##### #						34,35%
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik								215.705.855	250.000.000				##### #						60,36%
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH								1.679.779.466	1.795.619.600				##### #						213,82%
Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan								241.066.000	213.034.800				##### #						74,26%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan								146.270.000	160.897.000				##### #						92,94%
Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum								47.398.000	52.137.800				-						
Fasilitasi Penataan Wilayah								47.398.000	-				##### #						90,89%
Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah								1.040.508.000	1.144.558.800				##### #						127,05%
Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD								381.456.000	419.601.600				##### #						57,16%
Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan								160.418.000	176.459.800				##### #						522,64%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan							498.634.000	548.497.400				##### #					53,25%	
	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah							398.205.466	438.026.000				##### #					525,04%	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah							398.205.466	438.026.000				##### #					525,04%	
	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta							-	-				-					0,00%	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama							-	-				-					0,00%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT							##### ##	38.422.982.875				##### #					79,22%	
	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual							##### ##	13.363.394.000				##### #					6,88%	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual							##### ##	11.332.491.500				-					0,00%	
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual							1.846.275.000	2.030.902.500				##### #					45,25%	
	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar							##### ##	24.059.588.875				##### #					122,26%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				296.406.250	326.046.875				######									79,17%
	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				4.127.355.490	4.500.000.000				######									0,47%
	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				#######	19.233.542.000				######									151,80%
	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar				875.000.000	1.000.000.000				######									7,73%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				250.000.000	300.000.000				######									11,06%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				375.000.000	400.000.000				-									0,00%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan							250.000.000	300.000.000				##### #					16,00%	
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM							825.589.260	908.148.180				##### #					111,65%	
	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan							580.000.000	638.000.000				##### #					128,70%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan							400.000.000	440.000.000				##### #					109,99%	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan												##### #						
	Pendokumentasiin Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya							60.000.000	66.000.000				##### #					8,22%	
	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota							120.000.000	132.000.000				##### #					76,01%	
	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum							245.589.260	270.148.180				##### #					71,40%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum							180.500.000	198.550.000				##### #					70,83%	
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM							65.089.260	71.598.180				##### #					72,98%	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							323.403.576	410.000.000				##### #					38,06%	
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian							133.403.576	160.000.000				##### #					22,39%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro							93.403.576	110.000.000				##### #					20,49%	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro							40.000.000	50.000.000				##### #					26,82%	
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam							120.000.000	150.000.000				##### #					57,95%	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan							30.000.000	40.000.000				##### #					33,25%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup							30.000.000	40.000.000				##### #					95,00%	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air							60.000.000	70.000.000				##### #					51,77%	
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD							70.000.000	100.000.000				##### #					33,81%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha							50.000.000	70.000.000				##### #					47,34%	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi																		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD																		
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah								20.000.000	30.000.000				-					0,00%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD																		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA								2.750.935.525	3.070.000.000				##### #					42,61%
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								1.535.440.000	1.740.000.000				##### #					29,03%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa								100.000.000	120.000.000				-					0,00%
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa								1.335.440.000	1.500.000.000				##### #					33,38%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa							100.000.000	120.000.000				-					0,00%	
	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik							1.037.960.846	1.140.000.000				##### #					66,59%	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik							937.960.846	1.000.000.000				##### #					73,69%	
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa							50.000.000	70.000.000				-					0,00%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa							50.000.000	70.000.000				-					0,00%	
	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa							177.534.679	190.000.000				##### #					19,88%	
	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa							65.534.679	70.000.000				##### #					28,65%	
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa							56.000.000	60.000.000				##### #					29,49%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa							56.000.000	60.000.000				-					0,00%	

	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						270.000.000	290.000.000				##### #						31,60%
	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah						150.000.000	160.000.000				##### #						39,51%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD																		
	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN																		
	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah							150.000.000	160.000.000				##### #						39,51%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah							120.000.000	130.000.000				##### #						21,72%
	Sub Kegiatan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah							120.000.000	130.000.000				##### #						21,72%
	Sub Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah																		

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi digunakan alat ukur yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan berdasarkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi dan sasaran strategis Sekretariat Daerah. Adapun Analisa Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah pada tahun 2022 adalah seperti yang tertuang pada table II.2.2 sebagai berikut:

Tabel II.2.2
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi		Penanggung Jawab
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi PD Setda yang berkualitas	Pencapaian RB PD Setda	Meningkatkan Tata Kelola Internal PD Setda	Nilai Sakip Perangkat Daerah	76 %	92.785.492	77.50 %	63.490.928	Biro Umum
				Survey Kepuasan Pelayanan Internal SETDA	80%	82.067.554.620	82,00 %	100.121.801.600	Biro Umum
2	Mewujudkan Kebijakan Daerah yang berkualitas	Percentase Kebijakan Daerah yang terimplementasi	Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian Penataan Organisasi Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum	Percentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Penataan Organisasi Daerah yang tersusun	80%	473.288.000	80%	820.556.600	Biro Organisasi
				Percentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang tersusun	90%	4.166.868.010	90%	3.864.390.230	Biro Pemerintahan
				Percentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Kesejahteraan Rakyat yang tersusun	75%	11.525.750.742	80,00 %	64.027.420.735	Biro Kesejahteraan Rakyat
				Percentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang hukum yang tersusun	90%	923.093.664	90, 00 %	1.341.090.100	Biro Hukum
			Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa	Percentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Perekonomian dan Pembangunan yang tersusun	65%	995.000.000	100 %	778.058.400	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
				Percentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang tersusun	50 %	1.407.767.968	100 %	2.138.031.165	Biro Pengadaan Barang Jasa

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari dokumen lainnya, maka isu-isu penting yang ada di Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

1. Optimalisasi kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan Daerah;
2. Efektifitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelembagaan;
3. Penataan Ketataklasanaan;
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
6. Optimalisasi Pengendalian Pembangunan;
7. Optimaliasi Pelayanan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
8. Penataan produk hukum dan meningkatkan budaya taat hukum;
9. Optimalisasi Penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah;
10. Belum optimalnya penataan Capaian Kinerja Penyenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022;
11. Belum optimalnya optimalisasi evaluasi produk hukum daerah;
12. Belum optimalnya penataan Kelembagaan Perangkat Daerah;
13. Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan Perangkat Daerah;
14. Belum Optimalnya penataan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat;
15. Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih;
16. Organisasi Perangkat daerah yang menyerahkan LAKIP Tahun 2018-2024 tepat waktu sebesar 90%;
17. Organisasi yang menyusun Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2018-2024 tepat waktu sebesar 90%; Renstra Setda Provinsi Bangka Belitung Tahun 2018-2024 55 | BAB III
18. Belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada Unit Pelayanan Publik (UPP) atas penilaian Ombudsmen;
19. Kurang memandaikan sarana kerja terutama tata ruang kerja yang belum sepenuhnya dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur;

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas guna mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan sasaran misi RPJMD, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu

mengatasi dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan fasilitasi dan koordinasi dalam menghasilkan rumusan kebijakan umum yang berkualitas dan akuntabel. Sehingga diperlukan keterlibatan pelaku pembangunan secara partisipatif melalui peningkatan kualitas peningkatan kapasitas SDM seluruh Biro lingkup Sekretariat Daerah, pemantapan kelembagaan Biro di tunjang oleh sarana dan prasarana kerja yang berkontribusi secara optimal dalam membangun etos kerja yang prima, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, meningkatkan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas, dan meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu didukung dengan program dan kegiatan.

Review terhadap rancangan awal RKPD adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam rancangan awal RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Hasil review tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.4.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

TABEL TC. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun 2024 merupakan rangkuman Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses terlampir pada Tabel sebagai berikut :

Tabel
**Rumusan Usulan Program/Kegiatan
 Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Validasi
 Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
1	PROGRAM KESEJAHTER AAN RAKYAT	Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	Kekurangan dana untuk pembangunan masjid	Desa simpang katis kec. simpang katis, Provinsi Bangka Belitung	1	paket
2		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	Kuranya dana untuk pembangunan masjid	Desa Sungkap Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung	1	paket
3		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	Kekurangan dana untuk pembangunan masjid	Desa Teru Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung	1	paket
4		belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Pembangunan Masjid Belum Tuntas, mohon bantuan dari provinsi	Desa Paya Benua Kec. Mendo Barat, Provinsi Bangka Belitung	1	unit
5		belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Pemenahan sarana pagajian ibu-ibu dll dan Prasarana TK/TPA	Desa Paya Benua Kec. Mendo Barat, Provinsi Bangka Belitung	20	SET
6		belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Bantuan Pembangunan Mushola	Kampus Stisipol Pahlwan 12 Sungailiat, Provinsi Bangka Belitung	1	Unit
7		belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	pembangunan papin blok masjid Desa Fajar indah dikarenakan sering banjir	Desa Fajar Indah, Provinsi Bangka Belitung	200	meter
8		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	Kekurangan dana untuk pembangunan masjid	Desa Romadon Kecamatan Sungaiselan, Provinsi Bangka Belitung	1	paket
9		belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	pembangunan rehabilitasi gedung TK / Paud dikarenakan sudah layak tidak layak dan rawan bocor	Desa Fajar Indah, Provinsi Bangka Belitung	1	unit

10		belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	peningkatan sarana prasarana (konblok, sumur bor, MCK) pondok Pesantren Syarifatul Hidayah dikarenakan belum tersedianya sumur bor dan MCK	Desa Sumber Jaya Permai, Provinsi Bangka Belitung	1	unit lengkap
11		belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	pembangunan papin blok halaman darul Hikmah dikarenakan terdapatnya genangan air sehingga menghambat pelaksanaan upacara	Desa Batu Betumpang, Provinsi Bangka Belitung	1200	meter
12		belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Pembangunan Masjid Nurul Iman Belum Tuntas, Mohon Bantuan Dana Hibah dari Provinsi	Desa Paya Benua Kec. Mendo Barat, Provinsi Bangka Belitung	1	Unit
13		belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Bantuan Sarana dan Prasarana TK/TPA dan Sarana Pengajian Ibu-ibu	Desa Paya Benua Kec. Mendo Barat, Provinsi Bangka Belitung	50	Unit
14		belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Bantuan Pembangunan Mushola/ Renovasi Mushola Karena Tidak Bisa Lagi Menampung Jama'ah	Kampus Stisipol Pahlawan 12 Sungailiat, Provinsi Bangka Belitung	1	Unit
15		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	kurangnya dana untuk pembangunan masjid	Desa Beruas Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung	1	paket
16		belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Permohonan Bantuan Peningkatan Bangunan Mushola Di karenakan Kapasitas mushola tidak bisa Menampung Sejumlah Siswa dan Guru	SMANSA 1 PEMALI KEC. PEMALI, Provinsi Bangka Belitung	1	Unit
17		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	dana pembangunan masjid secara swadaya masih minim	Masjid Amaliah Desa Payung, Provinsi Bangka Belitung	1	paket
18		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	kurangnya perhatian kepada pengurus masjid	Desa Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung	1	paket
19		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	Kekurangan dana untuk pembangunan masjid	Desa Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung	3	paket
20		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	Kekurangan dana untuk pembangunan pesantren	Pesantren di Desa Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung	3	paket
21		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	Kekurangan dana untuk pembangunan pesantren	Pesantren di Desa Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung	3	paket
22		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	Kurangnya perhatian kepada pengurus masjid	Desa Simpang Katis Kecamatan simpang katis, Provinsi Bangka Belitung	3	paket

23		belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Pembangunan masjid Baiturrahman	Dusun Bangun Jaya Desa Air Kuang Kec. Jebus Kab. Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung	1	unit
24		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	masyarakat mengajukan renovasi masjid Al-Huda Desa Simpang Yul	Desa Simpang Yul, Provinsi Bangka Belitung	1	Unit/hari
25		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	masyarakat mengajukan pembangunan shiring pembuangan air dekat masjid simpang yul	Desa Simpang Yul.Kecamatan tempilang, Provinsi Bangka Belitung	1	Unit/hari
26		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	masyarakat mengajukan renovasi masjid dusun Nyikep Desa penyampak	Dusun Nyikep,Desa Penyampak, Provinsi Bangka Belitung	1	Unit/hari
27		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	masyarakat mengajukan renovasi Masjid Dusun Luenc,Desa simpang Yul	Dusun Luenc,Desa Simpang Yul, Provinsi Bangka Belitung	1	Unit/hari
28		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	masyarakat mengajukan pembangunan Masjid Dusun Ganjan Desa dendang	Dusun Ganjan,Desa Dendang, Provinsi Bangka Belitung	1	Unit/hari
29		Belum terpenuhinya UHC (Universal Health Coverage) atau jaminan kesehatan	Bantuan Iuran Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional PPBU dan BP Pemda Bangka Barat	Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat JL. Daya Baru Pal 4 , Provinsi Bangka Belitung	1	proposal
30		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	masyarakat mengajukan renovasi masjid Dusun Juruh desa Dendang	Dusun Juruh, Desa dendang, Provinsi Bangka Belitung	1	Unit/hari
31		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	masyarakat mengajukan renovasi masjid dusun Sungkai desa tugang	dusun Sungkai,Desa Tugang, Provinsi Bangka Belitung	1	Unit/hari
32		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	masyarakat mengajukan renovasi masjid Desa telak	desa telak,, Provinsi Bangka Belitung	1	Unit/hari
33		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	masyarakat mengajukan renovasi masjid desa sinar sari	desa Sinar sari, Provinsi Bangka Belitung	1	Unit/hari
34		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	Kurangnya dana untuk pembangunan masjid	Desa Sungkap Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung	3	paket
35		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	Mengajukan Pembangunan Mushola Sekolah	SMKN 1 Simpang Teritip, Provinsi Bangka Belitung	1	Unit/hari
36		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	Kekurangan dana untuk pembangunan masjid	Desa Teru Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung	3	paket
37		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	Kekurangan dana untuk pembangunan masjid	Desa Romadon Kecamatan Sungai Selan, Provinsi Bangka Belitung	3	paket
38		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	Kurangnya dana untuk pembangunan masjid	Desa Beruas Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung	3	paket

39		Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat	membutuhkan pembangunan pagar kantor DPC NU	Jl. Teladan Toboali, Provinsi Bangka Belitung	200	meter
40		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	bantuan pembangunan bangunan utama, wc/tempat wudhu, pagar, dan balai Masjid Ar-Rozzaq	Jl. Melayu RT. 001/ RW. 006, Kel. Teladan, Provinsi Bangka Belitung	7292220 00	rupiah
41		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	membutuhkan pembangunan pagar Masjid Al-Fithrah	Jl. AMD. RT 09/ RW. 06 Teladan Toboali, Provinsi Bangka Belitung	1850000 00	rupiah
42		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	Pembangunan /renovasi masjid baitul iman	dusun air anyir desa air anyir kec. merawang, Provinsi Bangka Belitung	1	buah
43		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	penyelesaian pembangunan gedung gereja dan prasarana gereja GBI Jemaat Sihin	Dusun sinar rembulan desa riding panjabg Kec. Merawang, Provinsi Bangka Belitung	1	Buah
44		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	pembangunan panti asuhan kabar baik pada yayasan kabar baik bangka	dusun sigambir desa air ruay kec. pemali, Provinsi Bangka Belitung	1	buah
45		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	pengadilan sarana dan alat musik yayasan elsadai bedukang pada gereja panteskota di indonesia (Gpdi)	yayasan elsadai bedukang pada gereja panteskota di indonesia (Gpdi), Provinsi Bangka Belitung	1	paket
46		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	pembangunan gereja kabar baik indonesia	pemali, Provinsi Bangka Belitung	1	buah
47		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	Bantuan Pembagunan Mushola Jamil Afkar agar dapat menjadi Masjid serta pembentukan Lembaga Masjid	Desa Mancung, Provinsi Bangka Belitung	1	Unit
48		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	belum adanya sarana dan prasarana ibadah yang memadai	kelurahan Paal satu, kecamatan tanjung pandan, Provinsi Bangka Belitung	1	unit
49		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	masyarakat desa kelumbi mengajukan renovasi masjid	Desa Buyan Kelumbi, Provinsi Bangka Belitung	1	Unit/hari
50		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	Dikarenakan jumlah siswa yang semakin banyak, maka diperlukan perluasan tempat ibadah/Mushola di SMK Negeri I (STM) Toboali Kabupaten Bangka Selatan	Jl. Air Benar No.33183, Teladan, Kec. Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung 33783, Provinsi Bangka Belitung	1	paket
51		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	Tempat wudhu antara siswa dan siswi di SMA 1 Toboali saat ini masih bergabung, oleh karena itu agar dibangun batas tempat wudhu antara siswa dan siswi	Jl. Puput, Toboali, Kec. Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung 33783, Provinsi Bangka Belitung	1	paket

52		belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Permohonan Pembangunan dan renovasi gedung GOJU (tempat latihan tarung), kurangnya anggaran untuk merenovasi gedung	Jl. Bukit Manggis RT/RW 07/02 Kel. Bukit Merapin Kec. Gerunggang, Provinsi Bangka Belitung	1	Unit
53		belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Bantuan dana pengadaan sarana prasarana alat bantu penunjang fasilitas pembelajaran TPA Al Amanah	Jl. Cempedak 1 RT/RW 08/03, Provinsi Bangka Belitung	2	Unit
54		belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Permohonan bantuan dana renovasi masjid	Pasir Putih, Provinsi Bangka Belitung	1	Unit
55		belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Bantuan dana untuk kelengkapan kegiatan rebana dan seragam qosidah	Kec. Rangkui, Provinsi Bangka Belitung	20	Unit
56		belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Pembangunan masjid Al-Barokah	Jl. Gandaria I Gang Sumber Rezeki RT/RW 07/03 Kel. Air Kepala Tujuh Kec. gerunggang, Provinsi Bangka Belitung	1	Unit
57		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	Belum tersedianya sarana prasarana ibadah yang memadai	Kel.paal satu, kec.tanjung pandan, Provinsi Bangka Belitung	1	Unit
58		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	Belum adanya sarana dan prasarana ibadah yang memadai	Kel.paal satu, kec.tanjungpandan, Provinsi Bangka Belitung	1	Unit
59		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	belum adanya teras masjid desa mancung	desa mancung, Provinsi Bangka Belitung	1	paket
60		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	sarana dan prasarana temapt ibadah yang kurang memadai	Desa Buluh Tumbang, kecamatan Tanjungpandan, Provinsi Bangka Belitung	1	unit
61		belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Bantuan Dana Pembangunan Masjid AL ITTIHAD Dusun Sungkai Desa Tugang	Dusun Sungkai RT 14 Desa Tugang Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung	1	Proposal
62		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	renovasi masjid dusun Linkun desa penyampak	Dusun Linkun Desa Penyampak, Provinsi Bangka Belitung	1	Unit/hari
63		belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Bantuan Dana untuk Pembangunan Masjid AN NUR	Desa Sijk Kecamatan Sijk Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung	1	Proposal
64		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	Belum ada dan belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai	SMK PGRI PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung	1	Unit
65		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	Renovasi dan perluasan masjid Nurul Hidayah Kampung Jawa	Masjid Nurul Hidayah Kec.Belinyu Kab. Bangka , Provinsi Bangka Belitung	1	unit

			Belinyu			
66		belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Pembangunan Tempat Belajar Agama (TPA) di Kelurahan Lubuk kelik.	Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung	1	Unit
67		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	Pembangunan kawasan pemakaman tionghoa	Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung	1	Kawasan
68		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	Pembangunan TPA masjid Al-Ma'firoh	Kelurahan Kuday tepatnya di kawasan/perkampungan Air Hanyut Pengerukan bekas eks tambang , Provinsi Bangka Belitung	1	Unit
69		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	Bantuan Pembangunan dan Peralatan/Perlengkap an Pondok Pesantren Nurul Hikmah Al Azhar	Desa Air Ruai Kecamatan Pemali , Provinsi Bangka Belitung	1	miliar
70		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	Pembangunan/Rehab ilitasi Gereja HKBP Sungailiat	Gereja HKBP Sungailiat, Provinsi Bangka Belitung	500	Juta
71		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	Pembangunan/Rehab ilitas Kelenteng Kwanti Miau Amal Abadi Desa Batu Rusa	Desa Batu Rusa , Provinsi Bangka Belitung	500	Juta
72		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	Pembangunan/Rehab ilitas Masjid Agung Sungailiat	Masjid Agung Sungailiat, Provinsi Bangka Belitung	5	Miliat
73		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	Pembangunan/Rehab ilitas GPDI Eklesia Deniang Cit	Desa Cit Kecamatan Riau Silip, Provinsi Bangka Belitung	500	Juta
74		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	Pembangunan/Rehab ilitas Yayasan Daarusalam Karya Makmur Pemali	Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali, Provinsi Bangka Belitung	500	Juta
75		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	Pembangunan/Rehab ilitas Yayasan Roudotul Ilmi Pemali (Pondok Modern Roudotul Ilmi Pemali)	Kecamatan Pemali, Provinsi Bangka Belitung	500	Juta
76		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	Pembangunan Masjid Santri Perempuan Ponpes Bahrul Ulum Islamic Center Sungailiat	Sinar Baru, Sungailiat, Provinsi Bangka Belitung	500	Juta
77		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	Rehabilitasi Masjid	Desa Tanjung Gunung, Provinsi Bangka Belitung	100	Juta
78		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	Pembangunan Gereja karena belum ada gereja	Koba, Provinsi Bangka Belitung	300	Juta
79		belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	BANTUAN DANA HIBAH UNTUK YAYASAB DARUL ADZKAR PANGKALPINANG	JALAN JEBUNG DALAM, Provinsi Bangka Belitung	1	UNIT

80		belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	BANTUAN DANA HIBAH UNTUK PONDOK PESANTREN TAHFIDHUL QUR'AN MANAABI'UL KAROMAH	JALAN HORMEN MADDATI, KELURAHAN MELINTANG, Provinsi Bangka Belitung	1	UNIT
81		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	Tempat ibadah (masjid) yang sempit dan terasa panas membuat para warga merasa tidak nyaman dalam beribadah sehingga berusaha mengusulkan untuk pemasangan bajaringan untuk masjid	Desa Nibung, Provinsi Bangka Belitung	1	paket
82		belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Bantuan dana hibah untuk pembangunan masjid al-jariyah	desa membalong, Provinsi Bangka Belitung	1	banguna n
83		belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Bantua dana hibah untuk pembangunan ruang kelas yayasan an-nawawi mubarok	Desa membalong, Provinsi Bangka Belitung	1	banguna n
84		belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	pengajuan pembangunan masjid Al Barakah desa kimak	Desa Kimak, Provinsi Bangka Belitung	1	unit
85		belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	usulan pembangunan tempat wudhu, kamar mandi, dan pemasangan baja ringan masjid at taqwa pangkal niur desa banyuasin	Desa Banyuasin, Riau Silip, Provinsi Bangka Belitung	1	unit
86		belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	usulan seragam majelis taklim yayasan mujahidin	sungailiat, bangka, Provinsi Bangka Belitung	1	lusin
87		belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	usulan perabikan dan pembangunan masjid nurul iman, desa saing	desa sang, Provinsi Bangka Belitung	1	unit
88		belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	usulan bantuan pembangunan masjid nurul falah desa bakam	desa bakam, Provinsi Bangka Belitung	1	unit
89		belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	usulan renovasi fisik musola tanwirul umam desa kemuja	desa kemuja, Provinsi Bangka Belitung	1	unit

		Pelayanan Dasar				
90		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	renovasi Masjid kelumbi	Desa Buyan Kelumbi, Provinsi Bangka Belitung	1	PAKET
91		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	Renovasi Masjid Jamik tempilang	Desa Tempilang, Provinsi Bangka Belitung	1	PAKET
92		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	Pembangunan masjid air menduyung	desa Air Menduyung, Provinsi Bangka Belitung	1	PAKET
93		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	pembangunan talud masjid simpang yul	Desa Simpang Yul, Provinsi Bangka Belitung	1	PAKET
94		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	Bantuan untuk Pagar Perkuburan di Desa Pangek Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat	Desa Pangek, Provinsi Bangka Belitung	100	Meter
95		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	Kekurangan dana untuk pembangunan masjid	Desa Simpang Katis Kec. Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung	3	paket
96		Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	Kurangnya dana untuk pembangunan masjid	Desa Sungkap Kec. Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung	3	paket
97		belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	masyarakat Desa Payabenua memohon adanya bantuan untuk pembangunan masjid Desa Payabenua Kec. Medo Barat Kab. Bangka	Desa Payabenua Kec. Mendo Barat, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Bangka Belitung	1	unit
98		belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	kelompok ibu-ibu pengajian Desa Payabenua memohon adanya bantuan sarana pengajian	Desa Payabenua Kec. Mendo Barat, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Bangka Belitung	1	paket
99		belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	para dosen kampus stisipol 12 memohon adanya bantuan untuk pembangunan masjid kampus	Kampus Stisipol Pahlwan 12 Sungailiat, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Bangka Belitung	1	unit

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Selaras dengan agenda pembangunan nasional arah kebijakan dan strategi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bagian dari arah kebijakan dan strategi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional. sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Tema pembangunan nasional tahun 2022 diarahkan untuk pemulihan dampak pasca covid 19 dengan berorientasi pada membangun kedepan dengan lebih baik (Build Forward Better), adapun tema pembangunan nasional tahun 2022 adalah: "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural".

Harus kita ingat bahwa fondasi paling awal dari pemulihan ekonomi adalah pengendalaian pasca bencana nasional (covid 19) dan untuk selanjutnya menyelesaikan inflasi khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan mendorong industri agar bangkit dan para pekerja bisa mulai bekerja kembali, sehingga mampu membuat sisi permintaan domestik meningkat, nilai tambah sektor industri harus ditingkatkan, ketahanan pangan harus meningkat dan pemulihan sektor pariwisata harus berjalan dengan baik. Pertumbuhan ekonomi harus menjadi bagian penting bagi penyelesaian masalah. Pertumbuhan ekonomi harus menjadi mesin bagi pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi baik antar daerah maupun antar desa dengan kota. Namun semuanya harus tetap dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat.

Reformasi struktural secara besar-besaran sudah dimulai dengan penetapan undang-undang Cipta Kerja. Semua Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah harus sinergis dalam melaksanakan dan memanfaatkan reformasi struktural. Salah satu program prioritas terkait tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah prioritas Reformasi Birokrasi yang mana sebagai upaya dukungan terhadap pencapaian program nasional. Selain pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga akan meningkatkan peran pada kebijakan-kebijakan terkait pelayanan publik.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Perangkat daerah

Tujuan disusunnya Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah untuk membangun sebuah rencana pembangunan Daerah sebagai pedoman dalam menyusun program dan indikator kinerja 1 (satu) tahun kedepan sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang dilimpahkan kepada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dimana di dalam renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebutkan bahwa Sekretariat Daerah memiliki tugas dan fungsi harus dapat memberikan layanan yang baik kepada pimpinan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur yang berkualitas, profesional dan berjiwa pelayanan prima. Atau yang dikenal dengan Semboyan ASN "Primadona" Adapun tujuan yang ingin dicapai dari misi tersebut yaitu Meningkatkan tatakelola penyelenggaraan pemda, sistem akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan pelayanan pemda terhadap masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah Meningkatnya peran koordinasi dan monev dalam merumuskan kebijakan daerah dan Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan yang lebih optimal. Di dalam renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebutkan bahwa Sekretariat Daerah memiliki tugas dan fungsi harus dapat memberikan layanan yang baik kepada pimpinan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur yang berkualitas, profesional dan berjiwa pelayanan prima. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari misi tersebut yaitu Meningkatkan tatakelola penyelenggaraan pemda, sistem akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan pelayanan pemda terhadap masyarakat.

Seperti kita ketahui Bersama bahwa pada tahun 2022 tepatnya di bulan Mei 2022 masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung akan berakhir dan akan dijabat oleh Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yang nantinya diharapkan dengan dijabat oleh Penjabat Gubernur, tetapi tidak mengendorkan semangat untuk mencapai mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

1. Program Pengelolaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Keuangan Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PD
- b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan
- c. Kegiatan Fasilitasi Peringatan hari Jadi Kabupaten/Provinsi/Nasional

2. Program Pengelolaan Administrasi Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga

- a. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Administrasi Keuangan dan Perlengkapan
- b. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan

3. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Kemasyarakatan

- a. Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan Sosial
- b. Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Agama dan Kebudayaan
- c. Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Pendidikan dan Kepemudaan

4. Program Pelayanan administrasi kegiatan, keprotokolan dan kehumasan

- a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Kehumasan, Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah
- b. Kegiatan Penyebarluasan informasi kegiatan KDH/WKDH, Sekretaris Daerah
- c. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Keprotokolan, Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah

5. Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

- a. Kegiatan Penatausahaan Pengadaan Barang dan Jasa
- b. Kegiatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
- c. Kegiatan Fasilitasi pengadaan barang dan jasa melalui bagian PBJ

6. Program Administrasi, Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian Daerah

- a. Kegiatan Koordinasi Penyiapan Rumusan Kebijakan dan Petunjuk Pelaksanaan Bidang Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
- b. Kegiatan Koordinasi Penyiapan Rumusan Kebijakan dan Petunjuk Pelaksanaan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Produk Daerah
- c. Kegiatan Koordinasi Penyiapan Rumusan Kebijakan dan Evaluasi Bidang Penanaman Modal dan BUMD

7. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

- a. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai.

8. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Pengkajian Hukum

- a. Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
- b. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum

- c. Kegiatan Dokumentasi dan Pengkajian Hukum

9. Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan

- a. Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah
- b. Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan Daerah

10. Program Kelembagaan dan Analisis jabatan, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, serta Pengembangan Kinerja

- a. Kegiatan Penataan kelembagaan perangkat daerah dan Analisis Jabatan
- b. Kegiatan Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah
- c. Kegiatan Akuntabilitas dan Pengembangan Kinerja

11. Program Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

- a. Kegiatan Fasilitasi Administrasi pemerintahan Umum
- b. Kegiatan Fasilitasi Kinerja Aparatur Kecamatan dan Lintas PD
- c. Kegiatan Fasilitasi Otonomi Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nama Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
BIRO HUKUM									
04	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								
4.01.01	PROGRAM Koordinasi dan Fasilitasi Hukum	Presentase usulan Kebijakan daerah dibidang hukum yang tersusun	Pangkalp inang	85%	Rp. 1.341.00.100,-	APBD		90%	Rp. 1.060.953.363,-
4.01.05.1.01	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Presentase rumusan kebijakan penataan perundang- undangan Pemerintah Provinsi	Pangkalp inang	85%	Rp. 1.121.850.700,-	APBD	1.Penambahan anggaran pada setiap sub kegiatan 2. Pemisahan Sub kegiatan fasilitasi dan evaluasi kab. Kota dengan kegiatan fasilitasi penyusunan perundang-undangan menjadi kegiatan tersendiri	90%	Rp. 931.843.691,-
4.01.05.1.01.0	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum	Pangkalp	40 dokumen	Rp. 894.981.500,-	APBD		40 Dokumen	Rp. 720.379.737,-

	Pengaturan	Pengaturan yang disusun	inang						
4.01.05.1.01.0 2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang disusun	Pangkalp inang	250 dokumen	Rp.48.484.600	APBD		250 dokumen	Rp. 53.332.442,-
4.01.05.1.01.0 3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang didokumentasikan dan dikelola	Pangkalp inang	90 dokumen	Rp.132.510.200,-	APBD		115 dokumen	Rp. 113.131.512,-
4.01.05.1.01.0 4	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang difasilitasi dan dievaluasi	Pangkalp inang	60 dokumen	Rp. 45.874.400,-	APBD		80 dokumen	Rp.45.000.000,-
4.01.05.1.02	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Rekomendasi penerapan kebijakan yang menjamin kepastian dan keadilan hukum Pemda dan Masyarakat	Pangkalp inang	85 %	Rp.219.239.400,-	APBD		90%	Rp. 138.109.672
4.01.05.1.02.0 1	Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah masalah hukum yang diselesaikan	Pangkalp inang	2 kasus	Rp. 105.431.900,-	APBD		2 kasus	Rp. 99.821.181,-
4.01.05.1.02.0 2	Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah masalah non Litigasi dan HAM yang diselesaikan	Pangkalp inang	4 dokumen	Rp. 113.807.500,-	APBD		5 dokumen	Rp. 38.288.491,-
BIRO ORGANISASI									
04	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Penataan Organisasi		80%	820.556.600	PAD		80%	1.718.767.553
4.01.02.1.01	KEGIATAN : Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Rumusan Kebijakan		80%	293.923.600	PAD		80%	572.922.518

		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan yang dikeluarkan							
4.01.02.1.01.0 1	SUB KEGIATAN : Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah dokumen hasil Penataan Kelembagaan Provinsi		12 Dokumen	70.792.100	PAD		12 Dokumen	143.133.327
4.01.02.1.01.0 2	SUB KEGIATAN : Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/kota		12 Dokumen	77.626.300	PAD		12 Dokumen	176.552.659
4.01.02.1.01.0 3	SUB KEGIATAN : Penataan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen hasil Analisis Jabatan,Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan		12 Dokumen	145.505.200	PAD		12 Dokumen	253.236.532
4.01.02.1.02	KEGIATAN : Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Rumusan Kebijakan Akuntabilitas Kinerja,Budaya Kerja, Reformasi Birokrasi, Tata Laksana Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dikeluarkan		80%	526.633.000	PAD		80%	1.145.845.035
4.01.02.1.02.0 1	SUB KEGIATAN : Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan RB		12 Dokumen	169.385.000	PAD		12 Dokumen	205.230.518
4.01.02.1.02.0 2	SUB KEGIATAN : Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		12 Dokumen	82.849.000	PAD		12 Dokumen	159.892.000

4.01.02.1.02.0 3	SUB KEGIATAN : Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja		27 Laporan	72.820.000	PAD		27 Laporan	207.800.000
4.01.02.1.02.0 4	SUB KEGIATAN : Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan		33 Dokumen	34.400.000	PAD		33 Dokumen	213.961.717
4.01.02.1.02.0 5	SUB KEGIATAN : Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah dokumen hasil fasilitasi peningkatan Pelayanan Publik		12 Dokumen	167.179.000	PAD		12 Dokumen	358.960.800
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA									
04	UNSUR PENDUKUNG URUSANPEMERINTAHAN								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								
4.01.07	PROGRAM Program Kebijakan dan Pelayanan Barang dan Jasa	Percentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pengadaan Barang dan Jasa yang tersusun		80%	2.138.031.165	PAD		80%	3,008,902,809
4.01.07.1.01	KEGIATAN : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Percentase Rumusan Kebijakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dikeluarkan		60%	762.648.900	PAD		60%	1,111,545,000
4.01.07.1.01.0 1	SUB KEGIATAN : Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa		12 Laporan	117.499.700	PAD		12 Dokumen	144,330,000
4.01.07.1.01.0 2	SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Barang dan Jasa		12 Laporan	579.399.600	PAD		12 Dokumen	843,030,000
4.01.07.1.01.0 3	SUB KEGIATAN : Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang		12 Laporan	65.749.600	PAD		12 Dokumen	124,185,000

		dan Jasa							
4.01.07.1.02	KEGIATAN : Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronika	Persentase Rumusan Kebijakan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang dikeluarkan		60%	1.160.519.765	PAD		60%	1,649,562,916
4.01.07.1.02.0 1	SUB KEGIATAN : Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik		12 Laporan	1.047.009.465	PAD		12 Laporan	1,455,762,916
4.01.07.1.02.0 2	SUB KEGIATAN : Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi		12 Laporan	64.512.500	PAD		12 Laporan	107,100,000
4.01.07.1.02.0 3	SUB KEGIATAN : Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		12 Laporan	48.997.800	PAD		12 Laporan	86,700,000
4.01.07.1.03	KEGIATAN : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Rumusan Kebijakan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa yang dikeluarkan		60%	214.862.500	PAD		80%	247,794,893
4.01.07.1.03.0 1	SUB KEGIATAN : Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa		12 Dokumen	75.933.700			12 Dokumen	89,760,000
4.01.07.1.03.0 2	SUB KEGIATAN : Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa		12 Orang	69.930.500	PAD		12 Orang	81,534,893
4.01.07.1.03.0	SUB KEGIATAN :	Jumlah Dokumen		12 Dokumen	68.998.300			12	76,500,000

3	Pendampingan, Konsultasi dan /atau Bintek Pengadaan Barang dan Jasa	Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi dan/ atau Bintek Pengadaan Barang dan Jasa						Dokumen	
---	---	---	--	--	--	--	--	---------	--

BIRO PEMERINTAHAN

03	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah			75%	10.492.127.291			75%	10.984.890.160
03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			75%	1.258.497.148			75%	1.245.497.148
03.1.01.01	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan (dokumen)	Kab/kota	38	220.000.000	APBD	Hasil rapat dengan Korsupgah KPK terkait Pengamanan Aset	25	218.000.000
03.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum (dokumen)	Kab/kota	2	300.000.000	APBD	Amanat Permendagri tentang APBD	2	300.000.000
03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah (dokumen)	Kab/kota	2	738.497.148	APBD	Rekomendasi DPRD Provinsi Kep.Bangka Belitung dalam rangka percepatan terkait Batas Daerah	3	727.497.148
03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah			75%	2.533.630.143			75%	2.689.393.012
03.1.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Kab/kota	4	781.627.257	APBD	Pemilu serentak dan Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati Walikota	4	859.789.983
03.1.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Kab/kota	3	1.200.000.000	APBD	-	3	1.250.000.000

03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab/kota	4	552.002.886	APBD	-	4	579.603.029
03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah			75%	6.700.000.000			75%	7.050.000.000
03.1.03.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Kab/kota	2	6.000.000.000	APBD	-	2	6.250.000.000
03.1.03.02	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Kab/kota	15	200.000.000	APBD	-	17	250.000.000
03.1.03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Kab/kota	6	500.000.000	APBD	-	6	550.000.000
BIRO KESRA									
4	UNSUR PENDUKUNG								
	URUSAN PEMERINTAHAN								
4.01	SEKRETARIATDAERAH								
4.01.04.	PROGRAM	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Kesejahteraan Rakyat yang tersusun		80%	64.027.420.745	PAD		80%	77.054.546.999
	Program Kesejahteraan Rakyat								
4.01.04.1.01	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Rekomendasi Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual yang dikeluarkan		85%	9.579.363.997	PAD		85%	12.678.323.816
4.01.04.1.01.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual yang dibuat		100 unit	8.219.241.297	PAD		100 unit	10.872.117.068

4.01.04.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual yang dibuat		60 lembaga	1.360.122.700	PAD		60 lembaga	1.806.206.748
4.01.04.1.02	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Rekomendasi Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang dikeluarkan		85%	54.312.009.168	PAD		85%	64.178.830.022
4.01.04.1.02.01	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan yang dibuat		60 dokumen	13.660.871.900	PAD		70 dokumen	11.832.508.223
4.01.04.1.02.02	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan yang dibuat		50 dokumen	62.312.800	PAD		60 dokumen	99.344.306
4.01.04.1.02.03	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial yang dibuat		160 dokumen	40.588.824.468	PAD		170 dokumen	52.246.977.493
4.01.04.1.03	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Rekomendasi Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang dikeluarkan		85%	136.047.580	PAD		85%	197.393.161

4.01.04.1.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan,Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan yang dibuat		12 Dokumen	57.086.980	PAD		12 Dokumen	84.355.934
4.01.04.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan yang dibuat		12 Dokumen	40.560.900	PAD		12 Dokumen	55.000.000
4.01.04.1.03.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	•Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan		12 Dokumen	38.399.700	PAD		12 Dokumen	58.037.227

		Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang dibuat							
BIRO UMUM									
04	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip Sekretariat Daerah	Pangkal pinang						
		Survey Kepuasan Pelayanan Internal PD Setda	Pangkal pinang	83%	99.646.703.000	PAD		83%	104.629.038.150
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan Setda	Pangkal pinang	83%	48.616.000.000	PAD		83%	51.046.800.000
4.01.01.1.02.01	Sube Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN		285 Orang	48.525.000.000	PAD		285 Orang	50.951.250.000
4.01.01.1.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	91.000.000	PAD		1 Laporan	95.550.000
4.01.01.1.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD		-	-	-		-	-
4.01.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada	Jumlah Barang Milik Daerah Yang	Pangkal pinang	83%	260.000.000	PAD		83%	266.500.000

	Perangkat Daerah	Teradministrasi Sesuai Dengan Peraturan							
4.01.01.1.03.06	Sub Kegiatan Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		12 Laporan	26.000.000	PAD		12 Laporan	266.500.000
4.01.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Pangkal pinang	83%	871.000.000	PAD		83%	914.550.000
4.01.01.1.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		1 Paket	540.000.000	PAD		1 Paket	567.000.000
4.01.01.1.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan		20 Pegawai	120.000.000	PAD		20 Pegawai	126.000.000
4.01.01.1.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan		20 Orang	90.000.000	PAD		20 Orang	94.500.000
4.01.01.1.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		10 Orang	121.000.000	PAD		10 Orang	127.050.000
4.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pangkal pinang	83%	16.116.400.000	PAD		83%	16.922.220.000
4.01.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan		12 Paket	641.050.000	PAD		12 Paket	673.102.500

4.01.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		12 Paket	165.000.000	PAD		12 Paket	173.250.000
4.01.01.1.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia		1 Paket	189.000.000	PAD		1 Paket	198.450.000
4.01.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jjumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan		12 Paket	64.350.000	PAD		12 Paket	67.567.500
4.01.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan		12 Paket	357. 000.000	PAD		12 Paket	374.850.000
4.01.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan		12 Paket	125. 000.000	PAD		12 Paket	131.250.000
4.01.01.1.06.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material Yang Disediakan		12 Paket	875.000.000	PAD		12 Paket	918.750.000
4.01.01.1.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		12 Paket	7.700.000.000	PAD		12 Paket	8.085.000.000
4.01.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	6.000.000.000	PAD		12 Laporan	6.300.000.000
4.01.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Yang Diadakan	Pangkal pinang	83%	5.058.172.000	PAD		83%	5.311.080.600
4.01.01.1.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan		3 Unit	702. 000.000	PAD		3 Unit	737.100.000

4.01.01.1.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan		4 Unit	964.572.000	PAD		4 Unit	1.012.800.600
4.01.01.1.07.04	Sub Kegiatan Pengadaan Alata Angkut Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alata Angkut Darat Tak Bermotor Yang Disediakan		3 Unit	33.000.000	PAD		3 Unit	34.650.000
4.01.01.1.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan		3 Unit	352.000.000	PAD		3 Unit	369.600.000
4.01.01.1.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan		50 Unit	1.400.000.000	PAD		50 Unit	1.470.000.000
4.01.01.1.07.07	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya Yang Disediakan		5 Unit	28.600.000	PAD		5 Unit	30.030.000
4.01.01.1.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 Unit	475.000.000	PAD		1 Unit	498.750.000
4.01.01.1.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan		3 Unit	793.000.000	PAD		3 Unit	832.650.000
4.01.01.1.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan		3 Unit	310.000.000	PAD		3 Unit	325.500.000
4.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkal pinang	83%	13.336.500.000	PAD		83%	14.003.325.000
4.01.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	33.000.000	PAD		12 Laporan	34.650.000
4.01.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		12 Laporan	3.700.000.000	PAD		12 Laporan	3.885.000.000

	Daya Air Dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan						
4.01.01.1.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan		12 Laporan	1.875.000.000	PAD		12 Laporan 1.968.750.000
4.01.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan		12 Laporan	7.728.500.000	PAD		12 Laporan 8.114.925.000
4.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Peninjng Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	Pangkal pinang	83%	8.945.380.000	PAD		83% 9.392.649.000
4.01.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya		16 Kendaraan	898.680.000	PAD		16 Kendaraan 943.614.000,00
4.01.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya		83 Kendaraan	2.400.000.000	PAD		83 Kendaraan 2.520.000.000
4.01.01.1.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara		120 Unit	128.700.000	PAD		120 Unit 135.135.000
4.01.01.1.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Umlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara		55 Unit	758.000.000	PAD		55 Unit 795.900.000
4.01.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya		6 Unit	3.452.000.000	PAD		6 Unit 3.624.600.000

		Yang Dipelihara/Direhabilitasi						
4.01.01.1.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi		6 Unit	1.058.000.000	PAD		6 Unit 1.110.900.000
4.01.01.1.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 Unit	250.000.000	PAD		4 Unit 262.500.000
4.01.01.1.11	Kegiatan Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan SETDA	Pangkal pinang	83%	1.605.000.000	PAD		83% 1.685.250.000
4.01.01.1.11.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan KDH Dan WKDH	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah		14 Orang	224.000.000	PAD		14 Orang 235.200.000
4.01.01.1.11.02	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut Kelengkapan KDH Dan WKDH	Jumlah Paket Pakaian Dinas Dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Disediakan		7 Paket	93.500.000	PAD		7 Paket 98.175.000
4.01.01.1.11.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up KDH Dan WKDH	Jumlah Pelayanan Medical Check Up Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Dilaksanakan		6 Orang	37.500.000	PAD		6 Orang 39.375.000
4.01.01.1.11.04	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH Dan WKDH	Jumlah Pelayanan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil		12 Orang	1.250.000.000	PAD		12 Orang 1.312.500.000

		Kepala Daerah Yang Dilaksanakan							
4.01.01.1.12	Kegiatan Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Rumah Tangga Setda	Pangkal pinang	83%	2.338.251.000	PAD		83%	2.455.163.550
4.01.01.1.12.01	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kdh	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Yang Disediakan		12 Paket	966.900.000	PAD		12 Paket	1.015.245.000
4.01.01.1.12.02	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wkdh	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Yang Disediakan		12 Paket	233.351.000	PAD		12 Paket	245.018.550
4.01.01.1.12.03	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Setda	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Yang Disediakan		12 Paket	1.138.000.000	PAD		12 Paket	1.194.900.000
4.01.01.1.13	Kegiatan Fasilitasi Materi Dan Komunikasi Pimpinan	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal SETDA	Pangkal pinang	83%	1.200.000.000	PAD		83%	1.260.000.000
4.01.01.1.13.01	Sub Kegiatan Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan Yang Disiapkan		-	-	-		-	
4.01.01.1.13.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		12 Laporan	1.200.000.000	PAD		12 Laporan	1.260.000.000
4.01.01.1.13.03	Sub Kegiatan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan		-	-	-		-	
4.01.01.1.14	Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Indeks Kepuasan Pelayanan Protokol Setda	Pangkal pinang	83%	1.650.000.000	PAD		83%	1.365.000.000
4.01.01.1.14.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Dan Koordinasi Pelaksanaan Acara		12 Laporan	100.000.000	PAD		12 Laporan	105.000.000,00
4.01.01.1.14.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi		-	-	-		-	

	Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Kunjungan Tamu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah							
4.01.01.1.14.03	Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan		12 Laporan	1.200.000.000	PAD		12 Laporan	1.260.000.000

BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	Kota Pangkalpinang	77,5				78 %	
4.01.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PD Setda yang disusun tepat waktu	Kota Pangkalpinang	67 %	72.927.400	PAD		95 %	398.524.500
4.01.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pangkalpinang	2 Dokumen	4.100.000	PAD		2 Dokumen	229,453,500
4.01.01.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pangkalpinang	1 Dokumen	4.100.000	PAD		1 Dokumen	9,661,200
4.01.01.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Kota Pangkalpinang	1 Dokumen	10.000.000	PAD		1 Dokumen	9,661,200

		Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
4.01.01.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Pangkalpinang	1 Dokumen	8.000.000	PAD		1 Dokumen	9,661,200
4.01.01.1.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Pangkalpinang	1 Dokumen	0			1 Dokumen	9,661,200
4.01.01.1.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pangkalpinang	2 Laporan	2.000.000	PAD		2 Laporan	9,661,200
4.01.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkalpinang	4 Laporan	35.755.500	PAD			120,765,000
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Perekonomian dan Pembangunan yang tersusun	Kota Pangkalpinang	75 %	101.200.000	PAD		75 %	
4.01.06.1.01	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Rekomendasi Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi	Kota Pangkalpinang	75 %	101.200.000	PAD		65 %	382.422.500

		Perekonomian yang dikeluarkan						
4.01.06.1.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro yang dibuat	Kota Pangkalpinang	12 Dokumen	101.200.000	PAD		12 Dokumen 209,326,000
4.01.06.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro yang dibuat	Kota Pangkalpinang	12 Dokumen	35.599.900			12 Dokumen 173,096,500
4.01.06.1.02	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Rekomendasi Pengelolaan Sumber Daya Alam yang dikeluarkan	Kota Pangkalpinang	75 %	288.945.300	PAD		65 % 257.632.000
4.01.06.1.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan yang dibuat	Kota Pangkalpinang	12 Dokumen	89.991.300			12 Dokumen 80,510,000
4.01.06.1.02.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pertambangan, Lingkungan Hidup, Energi dan Air yang dibuat	Kota Pangkalpinang	12 Dokumen	120.000.000			10 Dokumen 88,561,000
4.01.06.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pertambangan, Lingkungan Hidup, Energi dan Air yang dibuat	Kota Pangkalpinang	12 Dokumen	78.954.000			10 Dokumen 88,561,000
4.01.06.1.03	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Rekomendasi Pengelolaan BUMD	Kota Pangkalpi	75 %	46.989.600	PAD		220.377.000

		dan BLUD yang dikeluarkan	nang						
4.01.06.1.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah yang dibuat	Kota Pangkalpinang	1 Dokumen	0			5 Dokumen	72,459,000
4.01.06.1.03.02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi		Kota Pangkalpinang	1 Dokumen	16.989.600			1 Dokumen	32,204,000
4.01.06.1.03.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD		Kota Pangkalpinang	1 Dokumen	0				0
4.01.06.1.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah yang dibuat	Kota Pangkalpinang	5 Dokumen	0			5 Dokumen	52,331,500
4.01.06.1.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD		Kota Pangkalpinang	1 Dokumen	30.000.000	PAD		1 Dokumen	60,382,500
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Administrasi Pembangunan yang tersusun							
4.01.08.1.01	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dikeluarkan	Kota Pangkalpinang	75 %	58.999.800	PAD		75 %	209.326.000
4.01.08.1.01.01	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD		Kota Pangkalpinang	4 Dokumen	0			1 Laporan	44,280,500

			nang						
4.01.08.1.01.02	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN		Kota Pangkalpinang	4 Dokumen	0			1 Laporan	44,280,500
4.01.08.1.01.03	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD dan APBN yang dibuat	Kota Pangkalpinang	1 Dokumen	58.999.800	PAD		1 Laporan	120,765,000
4.01.08.1.02	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Percentase Rekomendasi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dikeluarkan	Kota Pangkalpinang		113.140.900				170.199.140
4.01.08.1.02.01	Sub Kegiatan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan		1 Dokumen	57.141.000	PAD		1 Dokumen	60,382,500
	Sub Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah		1 Dokumen	55.999.900	PAD		1 Laporan	65,535,140
4.01.08.1.02.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah		6 Dokumen	0	PAD		1 Dokumen	44,280,500

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dimana berpedoman pada renstra Sekretariat Daerah untuk menjamin kesesuaian program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju serta berpedoman pada hasil evaluasi hasil renja Sekretariat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi renja Sekretariat Daerah tahun berjalan agar dapat memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan renja Sekretariat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Sekretariat Daerah. Penyusunan dokumen ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan tujuan seluruh pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah secara efektif dan efisien, disamping itu Renja ini dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) tahun 2024.

Penetapan program dan kegiatan dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja ini didasarkan atas prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan Provinsi yang telah tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah, dalam pelaksanaannya diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan bersinergi dalam upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini diutamakan prinsip efektif, efisien, akuntabel, transparan. Apabila tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai seluruh kegiatan yang tertuang dalam dokumen renja ini, program/kegiatan yang akan dilaksanakan didasarkan pada skala prioritas terutama dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah. Renja tahun 2024 ini setelah disempurnakan, kemudian akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

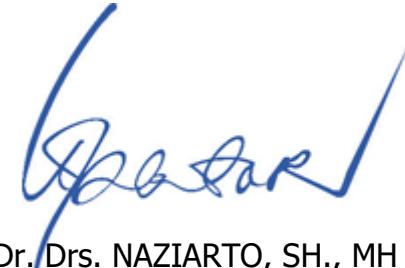
Untuk mengantisipasi target yang tidak tercapai atau bahkan capaian yang melebihi target yang telah ditetapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan maka

diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi tersebut terdiri dari pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana kerja. Evaluasi terhadap hasil rencana kerja dilaksanakan secara periodik setiap triwulan terkait program/kegiatan/subkegiatan, kinerja dan anggaran, permasalahan dan faktor pendorong dan penghambat serta rencana tindak lanjut yang diperlukan.

Demikianlah Rencana Kerja ini disusun sebagai dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.

Pangkalpinang, Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Dr. Drs. NAZIARTO, SH., MH
NIP. 19640321 199103 1 00

No.	K O D E	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2022)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2022(%)		Unit Perangkat Daerah Penangguh Jawab	s
						I	II	III	IV	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2022(%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11	13 = (12/7)x100%	14 = 6 + 12	15 = (14/5)x100%	16	17					

BIRO ORGANISASI

4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH																								
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Penataan Organisasi Daerah yang Berjalan	80%	904,856,052	80%	-	80 %	774,836,000	20	36,148,194	20	115,758,373	20	87,420,348	20	517,464,484	80 %	756,791,399	100.00%	97.67%	80%	756,791,399	100.00%	84%	
4.01.02.1.01	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Usulan Rekomendasi Kelembagaan	80%	301,333,350	80%	-	80 %	238,488,966	20	14,045,923	20	40,378,104	20	11,737,000	20	169,498,548	80 %	235,659,575	100.00%	98.81%	80%	235,659,575	100.00%	78.21%	Biro Organisasi Pangkalpinang
4.01.02.1.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah pendampingan dan pembinaan evaluasi organisasi yang dilaksanakan	8	Laporan	94,432,182	0	0	4	Laporan	80,432,756	1	16,852,584	1	8,887,000	1	52,502,393	4	Laporan	100.00%	97.28%	8	78,241,977	100%	82.86%	
		Jumlah UPT/Cabdin/Satuan Pendidikan yang terevaluasi	7	UPT/Cabdin		0	0	7	UPT/Cabdi n		1		2		78,241,977	7	UPT/Cabdin	100.00%		7		100.00%			
		Jumlah Raperda Kabupaten/Kota yang terevaluasi	4	Raperda		0	0	4	Raperda		1		1		4	Raperda	100.00%		4		100.00%				
		Jumlah Laporan/rekomendasi hasil evaluasi organisasi	4	Laporan		0	0	4	Laporan		1		1		4	Laporan	100.00%		4		100.00%				
4.01.02.1.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan pengendalian PD Kab/Kota	7	Laporan	95,944,908	0	0	4	Laporan	70,796,897	1	5,226,135	1	7,892,040	1	1,250,000	4	Laporan	100.00%	99.48%	7	70,431,663	100.00%	73.41%	
		Jumlah Evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota	7	Laporan		0	0	7	Laporan		1		2		70,431,663	7	Laporan	100.00%		7		100.00%			
		Jumlah Rekomendasi pembentukan PD Kab/Kota	7	Laporan		0	0	7	Laporan		1		2		70,431,663	7	Laporan	100.00%		7		100.00%			
4.01.02.1.01	Sub Kegiatan Analisis Jabatan	Jumlah Pembinaan dan pendampingan penyusunan Analisis Jabatan, Analisa Beban Kerja, dan peta jabatan sesuai dengan ketentuan	4	Kali	110,956,260	0	0	4	Kali	87,259,313	1	8,819,788	1	15,633,480	1	1,600,000	4	Kali	100.00%	99.52%	4	86,841,846	100.00%	78.27%	
		Jumlah Pembinaan dan pendampingan Penyusunan Standar Kompetensi jabatan sesuai dengan ketentuan	4	Kali		0	0	4	Kali		1		1		86,841,846	4	Kali	100.00%		4		100%			
		Jumlah Pembinaan dan pendampingan penyusunan Evaluasi Jabatan sesuai dengan ketentuan	4	Kali		0	0	4	Kali		1		1		86,841,846	1	Kali	100.00%		4		100.00%			
		Jumlah PD yang menyusun Kebutuhan pegawai sesuai dengan ketentuan	4	PD		0	0	4	PD		1		1		86,841,846	4	PD	100.00%		4		100.00%			
		Jumlah jabatan yang sesuai dengan standar kompetensi yang sudah ditetapkan	1	Laporan		0	0	1	Laporan		1		1		86,841,846	1	Laporan	100.00%		1		100.00%			
4.01.02.1.02	Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Usulan Rekomendasi Reformasi Birokrasi	80%	603,522,702	80%	0	80%	536,347,034	20.00	22,102,271	20.00	75,380,269	20.00	75,683,348	20.00	347,965,536	80 %	521,131,824	100.00%	97.16%	60%	521,131,824	75%	86.35%	Biro Organisasi Pangkalpinang
		Persentase usulan rekomendasi Akuntabilitas Kinerja																							

	4.01.02.1.02	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Pertemuan Tim RBI yang dilaksanakan	2	Kali	98,350,000	0	0	2	Kali	85,215,000	0	0	1	1	2	Kali	55,412,630	100.00%	99.94%	2	85,167,278	100.00%	86.60%		
			Jumlah PD yang melaksanakan rencana aksi RB	27	PD		0	0	27	PD		6	7	7	7	27	PD		100.00%		27		100.00%			
			Jumlah monitoring rencana Aksi RB yang dilaksanakan	2	Kali		0	0	2	Kali		0	0	1	1	2	Kali		100.00%		2		100.00%			
			Jumlah Pembinaan Pelaksanaan RB yang dilaksanakan	18	Kali		0	0	18	Kali		4	4	5	5	18	Kali		100.00%		18		100.00%			
			Jumlah PD yang Melaporkan pelaksanaan RB	27	PD		0	0	27	PD		6	6	7	8	27	PD		100.00%		27		100.00%			
			Jumlah rencana aksi RB Unit Setda yang dilaksanakan	8	Laporan		0	0	8	Laporan		1	2	2	3	8	Laporan		100.00%		8		100.00%			
	4.01.02.1.03	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1	Laporan		0	0	1	Laporan		0	0	1	-	1	Laporan		100.00%	98.14%	1	82,608,548	100.00%	78.61%		
			Jumlah dokumen SAKIP yang di aploed tepat waktu	27	Dokumen	105,084,800	0	0	27	Dokumen	84,172,202	6	6	7	8	27	Dokumen	65,531,448	100.00%		27		100.00%			
			Jumlah pembinaan akuntabilitas yang dilaksanakan	8	Kali		0	0	8	Kali		1	2	2	3	8	Kali		100.00%		8		100.00%			
			Jumlah PD yang mendapatkan reward and punishment	6	PD		0	0	6	PD		1	1	2	2	6	PD		100.00%		6		100.00%			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja Triwulan	4	Laporan		0	0	4	Laporan		1	1	1	1	4	Laporan		100.00%		4		100.00%			
	4.01.02.1.04	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah ajen perubahan yang melaksanakan rencana aksi agen perubahan	27	Agen Perubahan	93,828,000	0	0	27	Agen Perubahan	77,414,000	6	6	7	8	27	Agen Perubahan	47,481,224	100.00%	98.73%	27	76,429,154	100.00%	81.46%		
			Jumlah Pembinaan Agen Perubahan yang dilaksanakan	34	Kali		0	0	34	Kali		8	8	9	9	34	Kali		100.00%		34		100.00%			
			Jumlah monitoring rencana Aksi Agen Perubahan yang dilaksanakan	4	kali		0	0	4	Kali		1	1	1	1	4	Kali		100.00%		4		100.00%			
			Jumlah Agen Perubahan yang Melaporkan pelaksanaan Rencana Aksi	27	Laporan		0	0	27	Laporan		6	6	7	8	27	Laporan		100.00%		27		100.00%			
	4.01.02.1.05	Sub Kegiatan Pengelolaan Tatausaha Pemerintahan	Jumlah PD yang telah menyederhanakan proses bisnis dan SOP	35	PD	59,063,852	0	0	35	PD	44,683,404	8	9	9	9	35	PD	33,087,804	100.00%	93.43%	35	41,747,115	100.00%	70.68%		
			Jumlah pembinaan Tatausaha Pemerintahan yang dilaksanakan	43	Kali		0	0	43	Kali		10	-	11	11	43	Kali		100.00%		43		100.00%			
			Jumlah Monitoring Tatausaha Pemerintahan yang dilaksanakan	43	Kali		0	0	43	Kali		10	11	11	11	43	Kali		100.00%		43		100.00%			
	4.01.02.1.06	Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Unit layanan yang melaksanakan pelayanan publik dengan baik dan berkualitas	7	PD	247,196,050	0	0	7	PD	244,862,428	1	2	2	2	7	PD	146,016,210	100.00%	95.87%	7	234,743,109	100.00%	94.96%		
			Jumlah pembinaan dan pendampingan pelaksanaan pelayanan publik yang dilaksanakan	76	Kali		0	0	76	Kali		19	19	19	19	76	Kali		100.00%		76		100.00%			
			Jumlah Monitoring Tatausaha Pelayanan Publik yang dilaksanakan	12	Kali		0	0	12	Kali		3	3	3	3	12	Kali		100.00%		12		100.00%			
																		Rata-rata capaian kinerja (%)								
																		Predikat kinerja								
																		TOTAL RATA-RATA CAPOAAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								
																		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM								
																		Sangat Tinggi								
																		97.67%								
																		Sangat Tinggi								
		Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																								
		1. Kegiatan merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan tiap tahun																								
		2. Terjalannya kerjasama yang baik antar bagian bagian di Biro																								
		3. Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Kegiatan sudah memadai																								
		Faktor penghambat pencapaian kinerja :																								
		1. Masih perlu ditingkatkan lagi Koordinasi dengan Bagian bagian di Biro																								

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Provinsi berikutnya*:																								
BIRO UMUM																								
No.	K O D E	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2022 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2022)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2021(%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2021(%)	Unit Perangkat Daerah Penanguung Jawab	Lokasi / Ket.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11	13 = (12/7)x100%	14 = 6 + 12	15 = (14/5)x100%	16	17								
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																						
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH																						
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	79	BB	203,500,000																		
		Survey Kepuasan Pelayanan Internal SETDA		80	%	105,163,351,821		80	%	94,336,140,991	20.63 #####	20.57	21,575,581,694	20.72	21,764,395,671	21.05	29,877,844,509	82.96 %	##### 103.71% 93.65%	82.96	88,341,665,719	103.71% 84.00%		
	4.01.01.10	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan SETDA	80	%	54,202,275,413		77	%	45,638,487,795	21.19 #####	21.65	12,404,936,597	21.48	13,386,922,729	21.96	8,717,872,035	86.2797967 %	##### 112.05% 95.79%	86.28	43,716,588,439	107.85% 80.65%	Biro Umum	Pangkalpinang
	4.01.01.1.02	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pelayanan Urusan Gaji dan Tunjangan Internal SETDA yang dilaksanakan	24	Laporan	54,202,275,413		24	Laporan	45,638,487,795	6 #####	6	12,404,936,597	6	13,386,922,729	6	8,717,872,035	24 %	##### 100.00% 95.79%	24	43,716,588,439	100.00% 80.65%		
	4.01.01.1.0	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Perlengkapan SETDA	80	%	200,000,000		80	%	250,245,151	20.51 #####	0	20.04	0	20.25	0	20.67	250,245,151 81.46 %	250,245,151 101.83% 100.00%	81.46	250,245,151 101.83%	125.12%	Biro Umum	Pangkalpinang
	4.01.01.1.03	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilaksanakan	Jumlah Pelayanan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilaksanakan	12	Laporan	200,000,000		12	Laporan	250,245,151	3 #####	0	3	0	3	0	3	250,245,151 12 Laporan	250,245,151 100.00% 100.00%	12	250,245,151 100.00%	125.12%		
	4.01.01.1.0	Kegiatan Administrasi Kepegawaiwan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal SETDA	80	%	341,000,000		80	%	113,699,550	20.37 #####	0	20.04	0	20.25	0	20.89	92,125,000 81.55 %	92,125,000 101.93% 81.02%	81.55	92,125,000 101.93%	27.02%	Biro Umum	Pangkalpinang
	4.01.01.1.05	Sub Kegiatan Pengaduan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang dilaksanakan	Jumlah Pelayanan Pengaduan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang dilaksanakan	12	Laporan	176,000,000		1	Laporan	113,699,550	0 #####	0	0	0	0	0	1.00	92,125,000 1 Laporan	92,125,000 100.00% 81.02%	1	92,125,000 8.33%	52.34%		
	4.01.01.1.05	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan	Jumlah Pelayanan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan	12	Laporan	165,000,000		0		0	0 #####	0	0	0	0	0	0	0 0.00% 0.00%	0 0.00% 0.00%	0	0 0.00% 0.00%			
	4.01.01.1.0	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Rumah Tangga SETDA	80	%	13,820,311,405		80	%	15,800,459,086	20.51 #####	20.04	2,998,529,814	20.25	3,089,770,226	20.67	6,950,773,801	81.46 %	##### 101.83% 96.30%	81.46	15,215,160,781 101.83%	110.09%	Biro Umum	Pangkalpinang
		Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan SETDA		80	%			77	%			21.19		21.65								107.85%		

4.01.01.1.06	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dilaksanakan	Jumlah Pelayanan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dilaksanakan	12	Laporan	867,362,800			12	Laporan	319,592,164	3	42,301,500	3	32,677,800	3	38,105,500	3	56,505,279	12	Laporan	169,590,079	100.00%	53.06%	12	169,590,079	100.00%	19.55%		
4.01.01.1.06	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dilaksanakan	Jumlah Pelayanan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dilaksanakan	12	Laporan	82,500,000			1	Laporan	70,048,429	0	0	0	0	0	0	1	68,903,000	1	Laporan	68,903,000	100.00%	98.36%	1	68,903,000	8.33%	83.52%		
4.01.01.1.06	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang dilaksanakan	Jumlah Pelayanan Peralatan Rumah Tangga yang dilaksanakan	12	Laporan	82,500,000			1	Laporan	117,042,751	0	0	0	29,880,000	0	0	1	87,122,000	1	Laporan	117,002,000	100.00%	99.97%	1	117,002,000	8.33%	141.82%		
4.01.01.1.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang dilaksanakan	Jumlah Pelayanan Bahan Logistik Kantor yang dilaksanakan	12	Laporan	71,575,900			12	Laporan	65,064,403	3	9,688,000	3	10,208,000	3	26,950,180	3	17,603,820	12	Laporan	64,450,000	100.00%	99.06%	12	64,450,000	100.00%	90.04%		
4.01.01.1.06	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang dilaksanakan	Jumlah Pelayanan Barang Cetakan dan Penggandaan yang dilaksanakan	12	Laporan	393,116,880			12	Laporan	357,378,172	3	0	3	4,392,300	3	139,316,150	3	161,542,000	12	Laporan	305,250,450	100.00%	85.41%	12	305,250,450	100.00%	77.65%		
4.01.01.1.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan	Jumlah Pelayanan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan	12	Laporan	186,948,300			12	Laporan	84,000,000	3	0	3	18,770,500	3	19,248,500	3	40,991,000	12	Laporan	79,010,000	100.00%	94.06%	12	79,010,000	100.00%	42.26%		
4.01.01.1.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material yang dilaksanakan	Jumlah Pelayanan Penyediaan Bahan/Material yang dilaksanakan	12	Laporan	410,000,000			12	Laporan	599,999,774	3	51,454,500	3	95,862,000	3	98,949,423	3	336,024,911	12	Laporan	582,290,834	100.00%	97.05%	12	582,290,834	100.00%	142.02%		
4.01.01.1.06	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang dilaksanakan	Jumlah Pelayanan Kunjungan Tamu yang dilaksanakan	12	Laporan	6,850,000,000			12	Laporan	8,359,731,393	3	#####	3	1,802,810,265	3	1,837,108,254	3	3,420,955,725	12	Laporan	8,334,333,044	100.00%	99.70%	12	8,334,333,044	100.00%	121.67%		
4.01.01.1.06	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelayanan Perjalanan Dinas Internal SETDA yang dilaksanakan	12	Laporan	4,876,307,525			48	Laporan	5,827,602,000	12	799,184,140	12	1,003,928,949	12	930,092,219	12	2,761,126,066	48	Laporan	5,494,331,374	100.00%	94.28%	48	5,494,331,374	400.00%	112.67%		
		Jumlah Pelayanan Perjalanan Dinas Internal Biro Umum yang dilaksanakan	12	Laporan				4	Laporan		1		1		1		1		4	Laporan		100.00%	0.00%	4		33.33%	0.00%		
4.01.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Perlengkapan SETDA	80	%	2,800,000,000			80	%	4,395,630,120	20.51	0	20.34	0	20.66	0	20.86	4,016,736,000	82.37	%	4,016,736,000	100.00%	91.38%	82.37	4,016,736,000	102.97%	143.45%	Biro Umum	Pangkalpinang
4.01.01.1.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pelayanan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dilaksanakan	12	Laporan	2,000,000,000			0	Laporan	2,213,110,882	0	0	0	0	0	0	1	1,912,400,000	1	Laporan	1,912,400,000	100.00%	86.41%	1	1,912,400,000	8.33%	95.62%		
4.01.01.1.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pelayanan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilaksanakan	12	Laporan	800,000,000			0	Laporan	2,182,519,238	0	0	0	0	0	0	1	2,104,336,000	1	Laporan	2,104,336,000	100.00%	96.42%	1	2,104,336,000	8.33%	263.04%		
4.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal SETDA	80	%	14,613,157,290			80	%	13,308,152,834	20.51	#####	20.04	3,370,365,975	20.25	2,989,233,412	20.67	4,016,842,750	81.46	%	#####	101.83%	91.89%	81.46	12,228,305,612	101.83%	83.68%	Biro Umum	Pangkalpinang
4.01.01.1.08	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang dilaksanakan	Jumlah Pelayanan Jasa Surat Menyurat yang dilaksanakan	12	Laporan	5,435,650,000			12	Laporan	40,500,000	3	470,500	3	6,439,000	3	5,061,000	3	3,083,000	12	Laporan	15,053,500	100.00%	37.17%	12	15,053,500	100.00%	0.28%		

4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dilaksanakan	12	Laporan	4,885,100,000			36	Laporan	3,542,998,834	9	668,212,975	9	743,591,975	9	797,566,232	9	821,518,600	36	Laporan	3,030,889,782	100.00%	85.55%	36	3,030,889,782	300.00%	62.04%			
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pelayanan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dilaksanakan	12	Laporan	1,832,220,000			12	Laporan	1,996,154,000	3	49,280,000	3	338,035,000	3	495,906,180	3	907,041,150	12	Laporan	1,790,262,330	100.00%	89.69%	12	1,790,262,330	100.00%	97.71%			
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dilaksanakan	12	Laporan	2,460,187,290			12	Laporan	7,728,500,000	3	#####	3	2,282,300,000	3	1,690,700,000	3	2,285,200,000	12	Laporan	7,392,100,000	100.00%	95.65%	12	7,392,100,000	100.00%	300.47%			
4.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Perlengkapan SETDA	80	%	13,660,818,446			80	%	8,716,332,082	20.51	794,201,404	20.34	1,546,160,038	20.66	1,492,552,388	20.86	3,496,050,677	82.37	%	7,328,964,507	102.97%	84.08%	82.37	7,328,964,507	102.97%	53.65%	Biro Umum	Pangkalpinang	
4.01.01.1.09	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dilaksanakan	Jumlah Pelayanan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dilaksanakan	12	Laporan	3,608,190,465			4	Laporan	897,689,863	1	164,551,255	1	304,397,456	1	255,737,287	1	70,496,875	4	Laporan	795,182,873	100.00%	88.58%	4	795,182,873	33.33%	22.04%			
4.01.01.1.09	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dilaksanakan	Jumlah Pelayanan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dilaksanakan	12	Laporan	2,406,980,565			4	Laporan	2,065,830,000	1	57,060,700	1	294,576,500	1	340,564,256	1	645,829,575	4	Laporan	1,338,031,031	100.00%	64.77%	4	1,338,031,031	33.33%	55.59%			
4.01.01.1.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pelayanan Pemeliharaan Mebel yang dilaksanakan	12	Laporan	165,000,000			4	Laporan	56,900,000	1	18,227,000	1	4,628,700	1	-	1,027,400	1	12,709,900	4	Laporan	34,538,200	100.00%	60.70%	4	34,538,200	33.33%	20.93%		
4.01.01.1.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pelayanan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilaksanakan	12	Laporan	2,072,180,000			4	Laporan	336,308,929	1	3,070,350	1	73,500,000	1	78,320,650	1	70,389,000	4	Laporan	225,280,000	100.00%	66.99%	4	225,280,000	33.33%	10.87%			
4.01.01.1.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pelayanan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dilaksanakan	12	Laporan	4,680,077,886			4	Laporan	4,216,045,990	1	427,916,500	1	675,441,801	1	602,968,942	1	2,245,084,545	4	Laporan	3,951,411,788	100.00%	93.72%	4	3,951,411,788	33.33%	84.43%			
4.01.01.1.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilaksanakan	Jumlah Pelayanan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilaksanakan	12	Laporan	728,389,530			4	Laporan	1,143,557,300	1	123,375,599	1	193,615,581	1	215,988,653	1	451,540,782	4	Laporan	984,520,615	100.00%	86.09%	4	984,520,615	33.33%	135.16%			
4.01.01.1.11	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan SETDA	80	%	1,780,000,000			80	%	1,549,881,447	21.19	450,961,764	21.65	321,131,918	21.48	221,300,000	21.96	234,000,000	86.28	%	1,227,393,682	107.85%	79.19%	86.28	1,227,393,682	107.85%	68.95%	Biro Umum	Pangkalpinang	
4.01.01.1.11	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan	Jumlah Pelayanan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan	12	Laporan	265,000,000			24	Laporan	178,621,327	6	34,321,764	6	50,311,918	6	0	6	0	24	Laporan	84,633,682	100.00%	47.38%	24	84,633,682	200.00%	31.94%			

Keterkaitan antar Biro-biro dalam membuat Kebijakan Daerah yang berkualitas perlu ditingkatkan																		
Tidak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																		
Tidak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah provinsi berikutnya*):																		

*) Diisi oleh Kepala BAPPEDA

BIRO PENGADAAN BARANG DAERAH

No.	K O D E	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2022 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2022)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2022(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi / Ket.										
				Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2022)			I				II				III															
				5	6		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4																			16	17							
	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pelayan Pengadaan Barang dan Jasa yang tersusun	50	%	3,070,000,000			50	%	1,496,636,336	25.00	99,960,945	25.00	354,855,481	0.00	130,466,986	0.00	714,880,695	50.00		1,300,164,107	100.00%	86.87%	50.00	1,300,164,107	100.00%	42.35%		
	4.01.07.1.C	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Rekomendasi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dikeluarkan	50	%	1,740,000,000			50	%	597,742,684	25.00	65,706,445	25.00	214,776,209	25.00	68,240,936	25.00	196,835,965	100.00		545,559,555	200.00%	91.27%	100.00	545,559,555	200.00%	31.35%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pangkalpin	
	4.01.07.1.C	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	20	Laporan	120,000,000	8		12	Laporan	-	3	-	3	-	3	-	3	-	12	Laporan	-	100.00%	0.00%	20	-	100.00%	0.00%		
	4.01.07.1.C	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Barang dan Jasa	20	Laporan	1,500,000,000	8		12	Laporan	597,742,684	3	65,706,445	3	214,776,209	3	68,240,936	3	196,835,965	12	Laporan	545,559,555	100.00%	91.27%	20	545,559,555	100.00%	36.37%		
	4.01.07.1.C	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	20	Laporan	120,000,000	8		12	Laporan	-	3	-	3	-	3	-	3	-	12	Laporan	-	100.00%	0.00%	20	-	100.00%	0.00%		
	4.01.07.1.C	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Rekomendasi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang dikeluarkan	50	%	1,140,000,000			50	%	624,544,890	25.00	34,254,500	25.00	131,073,744	25.00	45,323,700	25.00	322,798,441	100.00	%	533,450,385	200.00%	85.41%	100.00	533,450,385	200.00%	46.79%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pangkalpin	
	4.01.07.1.C	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	20	Laporan	1,000,000,000	8		12	Laporan	576,733,594	3	30,904,500	3	131,073,744	3	37,938,700	3	297,459,091	12	Laporan	497,376,035	100.00%	86.24%	20	497,376,035	100.00%	49.74%		
	4.01.07.1.C	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	20	Laporan	70,000,000	8		12	Laporan	32,645,004	3	3,350,000	3	-	3	4,445,000	3	16,381,925	12	Laporan	24,176,925	100.00%	74.06%	20	24,176,925	100.00%	34.54%		
	4.01.07.1.C	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	20	Laporan	70,000,000	8		12	Laporan	15,166,292	3	-	3	-	3	-	2,940,000	3	8,957,425	12	Laporan	11,897,425	100.00%	78.45%	20	11,897,425	100.00%	17.00%	
	4.01.07.1.C	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Rekomendasi Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa yang dikeluarkan	50	%	190,000,000			50	%	274,348,762	25.00	-	25.00	9,005,528	25.00	16,902,350	25.00	195,246,289	100.00	%	221,154,167	200.00%	80.61%	100.00	221,154,167	200.00%	116.40%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pangkalpin	
	4.01.07.1.C	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	20	Laporan	70,000,000	8		12	Orang	69,433,826	3	-	3	2,870,000	3	4,454,190	3	47,552,247	12	Orang	54,876,437	100.00%	79.03%	20	54,876,437	100.00%	78.39%		

	4.01.01.1C	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PD Setda yang disusun tepat waktu	95 %	1,447,000,000			90 %	137,100,660	25.00	-	25.00		25.00	45,405,600	25.00	91,060,990	100 %	136,466,590	111.11%	99.54%	100	136,466,590	105.26%	9.43%	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Pangkalpin		
	4.01.01.1C	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen	755,000,000		4	Dokumen	80,567,746	1	-	1		1	24,380,800	1	55,592,346	4	Dokumen	79,973,146	100.00%	99.26%	4	79,973,146	50.00%	10.59%		
	4.01.01.1C	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen	50,500,000		1	Dokumen		-	-		-	-	-	-	-	-	-									
	4.01.01.1C	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dokumen	50,500,000		1	Dokumen		-	-		-	-	-	-	-	-	-									
	4.01.01.1C	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	Dokumen	50,500,000		1	Dokumen		-	-		-	-	-	-	-	-	-									
	4.01.01.1C	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	Dokumen	50,500,000		1	Dokumen		-	-		-	-	-	-	-	-	-									
	4.01.01.1C	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	8	Laporan	40,000,000		2	Laporan		-	-		-	-	-	-	-	-	-									
	4.01.01.1C	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	Laporan	450,000,000		4	Laporan	56,532,914	1	-	1		1	21,024,800	1	35,468,644	4	Laporan	56,493,444	100.00%	99.93%	4	56,493,444	25.00%	12.55%		
	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Perekonomian dan Pembangunan yang tersusun	75 %		733,403,576		75 %	703,073,554	18.75	33,461,516	18.75	56,812,516	18.75	117,632,511	18.75	478,092,754	75 %		685,999,297	100.00%	97.57%	75	685,999,297	100.00%	93.54%			
	4.01.06.1C	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Rekomendasi Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian yang dikeluarkan	65 %		293,403,576		65 %	191,351,929	25.00	-	25.00	2,606,900	25.00	6,365,630	25.00	167,502,096	100 %		176,474,626	153.85%	92.23%	100	176,474,626	153.85%	60.15%	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Pangkalpin	
	4.01.06.1C	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro yang dibuat	48	Dokumen	1,085,000,000		12	Dokumen	113,211,072	3	-	3	2,606,900	3	5,545,630	3	95,929,495	12	Dokumen	104,082,025	100.00%	91.94%	12	104,082,025	25.00%	9.59%		

	4.01.06.1.C	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro yang dibuat	48	Dokumen	900,000,000			12	Dokumen	78,140,857	3	-	3	-	3	820,000	3	71,572,601	12	Dokumen	72,392,601	100.00%	92.64%	12	72,392,601	25.00%	8.04%			
	4.01.06.1.C	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Rekomendasi Pengelolaan Sumber Daya Alam yang dikeluarkan	65 %		1,810,000,000			65 %		349,846,706	25.00	25,618,256	25.00	32,906,816	25.00	87,141,611	25.00	201,990,419	100 %		347,657,102	153.85%	99.37%	100	347,657,102	153.85%	19.21%	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan	Pangkalpin	
	4.01.06.1.C	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan yang dibuat	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan yang dibuat	48	Dokumen	410,000,000			12	Berkas	88,429,097	3	6,188,100	3	13,231,700	3	8,599,220	3	58,334,070	12	Berkas	86,353,090	100.00%	97.65%	12	86,353,090	25.00%	21.06%			
	4.01.06.1.C	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pertambangan, Lingkungan Hidup, Energi dan Air yang dibuat	48	Dokumen	700,000,000			12	Berkas	136,853,380	3	8,463,600	3	-	3	50,957,686	3	77,401,024	12	Berkas	136,822,310	100.00%	99.98%	12	136,822,310	25.00%	19.55%			
	4.01.06.1.C	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pertambangan, Lingkungan Hidup, Energi dan Air yang dibuat	48	Dokumen	700,000,000			12	Berkas	124,564,229	3	10,966,556	3	19,675,116	3	27,584,705	3	66,255,325	12	Berkas	124,481,702	100.00%	99.93%	12	124,481,702	25.00%	17.78%			
	4.01.06.1.C	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Rekomendasi Pengelolaan BUMD dan BLUD yang dikeluarkan	65 %		170,000,000			65 %		161,874,919	25.00	7,843,260	25.00	21,298,800	25.00	24,125,270	25.00	108,600,239	100 %		161,867,569	153.85%	100.00%	100	161,867,569	153.85%	95.22%	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan	Pangkalpin	
	4.01.06.1.C	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah yang dibuat	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah yang dibuat	20	Dokumen	120,000,000			5	Dokumen	100,242,919	1	6,613,260	2	17,198,800	1	17,003,870	1	59,424,070	5	Dokumen	100,240,000	100.00%	100.00%	5	100,240,000	25.00%	83.53%			
	4.01.06.1.C	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi		4	Dokumen					Dokumen																					
	4.01.06.1.C	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD		4	Dokumen					Dokumen																					

	4.01.06.1.C	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah yang dibuat	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah yang dibuat	20	Dokumen	50,000,000			5	Dokumen	61,632,000	1	1,230,000	2	4,100,000	1	7,121,400	1	49,176,169	5	Dokumen	61,627,569	100.00%	99.99%	5	61,627,569	25.00%	123.26%			
	4.01.06.1.C	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD		4	Dokumen					Dokumen																					
	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Administrasi Pembangunan yang tersusun	75 %		560,000,000			75 %		170,253,047	18.75	13,856,100	18.75		-	18.75	62,521,775	18.75	92,904,867	75 %		169,282,742	100.00%	99.43%	75	169,282,742	100.00%	30.23%		
	4.01.08.1.C	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dikeluarkan	65 %		310,000,000			65 %		109,192,384	25.00	13,856,100	25.00		-	25.00	26,149,960	25.00	68,545,947	100 %		108,552,007	153.85%	99.41%	100	108,552,007	153.85%	35.02%	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Pangkalpin
	4.01.08.1.C	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD		16	Dokumen	230,000,000			4	Dokumen																					
	4.01.08.1.C	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN		16	Dokumen	230,000,000			4	Dokumen																					
	4.01.08.1.C	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD dan APBN yang dibuat	16	Dokumen	650,000,000			4	Dokumen	109,192,384	1	13,856,100	1		-	1	26,149,960	1	68,545,947	4	Dokumen	108,552,007	100.00%	99.41%	4	108,552,007	25.00%	16.70%		
	4.01.08.1.C	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dikeluarkan	65 %		250,000,000			65 %		61,060,663	25.00		-	25.00		36,371,815	25.00	24,358,920	100 %		60,730,735	153.85%	99.46%	100	60,730,735	153.85%	24.29%	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Pangkalpin	
	4.01.08.1.C	Sub Kegiatan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	48	Dokumen	250,000,000			12	Dokumen	61,060,663	3		-	3		36,371,815	3	24,358,920	12	Dokumen	60,730,735	100.00%	99.46%	12	60,730,735	25.00%	24.29%			
	Sub Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah		24	Dokumen				6	Dokumen																					
	4.01.08.1.C	Sub Kegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	24	Dokumen				6	Dokumen																					
	4.01.08.1.02.03																														

Rata-rata capaian kinerja (%)		114.02%				
Predikat kinerja		Sangat Tinggi				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	991,748,629	98.85%				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Sangat Tinggi				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :						
- Pemanfaatan Penggunaan Teknologi Informatika						
- Kerjasama yang baik antara Bagian di Biro						
Faktor penghambat pencapaian kinerja :						
- Masih perlu ditingkatkan koordinasi antar bagian						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah provinsi berikutnya*):						

*) Diisi oleh Kepala BAPPEDA

BIRO HUKUM

No.	K O D E	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2022 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2021)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2022)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2021(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi / Ket.							
							5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = (12/7)x100%				
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																										
4.01	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang disahkan	90 %	1,889,481,103			90 %	1,889,481,103		28,923,184		278,903,627		584,983,799		788,070,388		90 %	1,680,880,998		88.96%						
	4.01.05.1.C	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Presentase produk hukum yang disahkan			#####				1,673,334,164.00		28,923,184		264,561,627		554,622,699		673,327,158		#####							
	4.01.05.1.C	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	1. Jumlah Bahan Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Gubernur	35 Dokumen	884,944,802		35 Dokumen	884,944,802	10	24,873,234	5	199,450,311	9	431,752,780	10	182,728,514	34	Dokumen	838,804,839	97%				Biro Hukum	Pangkalpin...		
		2. Jumlah Bahan Produk Hukum Daerah Berupa Raperda	10 Dokumen			10 Dokumen		3		0		0			4		7 Dokumen			70%					Biro Hukum	Pangkalpin...	
	4.01.05.1.C	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Bahan Produk Hukum Daerah berupa Keputusan Gubernur	500 Dokumen	298,463,716		500 Dokumen	298,463,716	238	3,639,950	247	12,497,516	176	37,353,889	187	180,869,436	848	Dokumen	234,360,791	170%				Biro Hukum	Pangkalpin...		
	4.01.05.1.C	Sub Kegiatan Pendokumentasiyan Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	1. Jumlah Bahan Pendokumentasiyan Produk Hukum Daerah dan Naskah Hukum Lainnya	100 Dokumen	305,626,146		100 Dokumen	305,626,146	306		339		18		194		857 Dokumen			857%							
		2. Jumlah Bahan Penyusunan Naskah Hukum Lainnya	100 Dokumen			100 Dokumen		55		155		44,464,844	41	68,744,844	75		188,952,308	326 Dokumen		302,571,996	326%				Biro Hukum		
		3. Jumlah Bahan Produk Hukum Daerah yang dipublikasikan	100 Dokumen			100 Dokumen		8		4		13		8			33 Dokumen			33%							
	4.01.05.1.C	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah produk hukum Kabupaten/Kota wilayah 1 yang difasilitasi dan dievaluasi	7 Dokumen			7 Dokumen		15		2		3		11			31 Dokumen			443%						
		Jumlah produk hukum Kabupaten/Kota wilayah 1 yang difasilitasi dan dievaluasi	7 Dokumen			7 Dokumen		17		2		3		11			33 Dokumen			471%							

		Jumlah produk hukum Kabupaten/Kota wilayah 2 yang difasilitasi dan dievaluasi	7 Dokumen		184,299,500			4	3	6	11	8,148,956	16,771,186	120,776,900	24 Dokumen	343%				
		Jumlah produk hukum Kabupaten/Kota wilayah 2 yang difasilitasi dan dievaluasi	7 Dokumen			184,299,500		4	3	6	11			145,697,042		343%				
		Jumlah produk hukum Kabupaten/Kota wilayah 3 yang difasilitasi dan dievaluasi	7 Dokumen				5	7	3	9				24 Dokumen		343%				
		Jumlah produk hukum Kabupaten/Kota wilayah 3 yang difasilitasi dan dievaluasi	7 Dokumen				5	7	3	9				24 Dokumen		343%				
														0						
4.01.05.1.C	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Percentase rekomendasi pemberian bantuan hukum masyarakat miskin dan penyelesaian masalah hukum Pemda	90 %	216,146,939		90 %	216,146,939		-	14,342,000	30,361,100		114,743,230	0	%	159,446,330			Biro Hukum Pangkalpin:	
D1.05.1.02.	SUB KEGIATAN FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH HUKUM	1. Jumlah bahan Penyelesaian Sengketa Hukum untuk Proses Persidangan (Kasus)	2 Kasus	115,423,130			2 Kasus	115,423,130	0	-	2	6,355,000	2	15,885,000		86,981,400	2 Kasus	109,221,400	100%	
		2. Jumlah Laporan	1 Dokumen				1 Dokumen		0	-		0				1 Dokumen			100%	
4.01.05.1.C	FASILITASI KEGIATAN BANTUAN HUKUM	1. Jumlah Bahan Pelaporan RANHAM	1 Dokumen	100,723,809		1 Dokumen		0	-	0		7,987,000	1			1 Dokumen			100%	
		2. Jumlah Bahan Usulan Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin	45 Orang				45 Orang		0	-	45	14,476,100			27,761,830		45 Orang	50,224,930	100%	
															Rata-rata capaian kinerja (%)	264.90%				
															Predikat kinerja	Sangat Tinggi				
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	88.96%				
															PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	Tinggi				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																				
- Pemanfaatan Penggunaan Teknologi Informatika																				
- Kerjasama yang baik antara TU di Biro-biro serta Perencanaan SETDA																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Belum																				
- Masih perlu ditingkatkan koordinasi antar pimpinan di Biro-biro																				
- Perlunya persamaan persepsi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah																				
- Keterikatan antar Biro-biro dalam membuat Kebijakan Daerah yang berkualitas perlu ditingkatkan																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*:																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah provinsi berikutnya*:																				
*) Dilis oleh Kepala BAPPEDA																				

BIRO PEMERINTAHAN

No.	K O D E	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2022)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2022)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2021(%)	Unit Perangkat Daerah Penangu	Lokasi / Ket. Lokasi / Ket.		
							I	II	III	IV								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11	13 = (12/7)x100%	14 = 6 + 12	15 = (14/5)x100%			16	17
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	

4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																									
4.01	SEKRETARIAT DAERAH																									
BIRO PEMERINTAHAN																										
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																									
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang tersusun	90 %	3,428,001,066			90 %	6,237,651,513	19.44	24,943,148	19.44	243,146,754	22.50	3,440,407,538	22.50	5,934,216,158	95.14 %	9,642,713,598	105.71%	154.59%	95.13542309	9,642,713,598	105.71%	281.29%		
4.01.03.1	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Rekomendasi Bagian Administrasi Kewilayahan yang dibuat	90 %	406,702,800			90 %	448,030,941	18.75	-	18.75	15,455,920	31.25	24,292,800	0.00	343,397,245	68.75 %	383,145,965	76.39%	85.52%	68.75	383,145,965	76.39%	94.21%		
4.01.03.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	53 Bidang	307,167,000	25 #####	17 Dokumen	194,998,257	3	-	3	7,435,920	5	Rp3,925,000	8	144,170,777	19 Dokumen	155,531,697	111.76%	79.76%	44	291,477,498	83.02%	94.89%			
4.01.03.1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pelaksanaan Tugas Pemerintahan yang dibuat	2 Dokumen	99,535,800	0 0	1 Dokumen	11,115,677	0	-	0	2,870,000	0	Rp4,510,000	1	11,025,170	1 Dokumen	18,405,170	100.00%	165.58%	1	18,405,170	50.00%	18.49%			
4.01.03.1.3	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	14 Dokumen	-	7 #####	12 Dokumen	241,917,007	3	-	3	5,150,000	3	Rp15,857,800	3	188,201,298	12 Dokumen	209,209,098	100.00%	86.48%	19	252,286,799	135.71%	#DIV/0!			
4.01.03.1.4	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase rekomendasi bagian otda yang dibuat	90 %	2,185,066,800			90 %	1,442,658,467	18.75	18,730,748	18.75	107,874,434	18.75	19,415,538	0.00	1,299,022,923	56.25 %	1,445,043,643	62.50%	100.17%	56.25	1,445,043,643	62.50%	66.13%		
4.01.03.1.5	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	4 Dokumen	801,057,600	2 -	12 Dokumen	212,352,180	3	14,730,748	3	27,555,131	3	Rp19,415,538	3	204,735,970	12 Dokumen	266,437,387	100.00%	125.47%	14	266,437,387	350.00%	33.26%			
4.01.03.1.6	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang dilaksanakan	21 Dokumen	336,877,800	4		12 Dokumen	1,000,819,191	3		3	23,606,678	3	Rp22,641,812	3	878,598,298	12 Dokumen	924,846,788	100.00%	92.41%	16	924,846,788	76.19%	274.53%		
4.01.03.1.7	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	20 Dokumen	1,047,131,400			12 Laporan	229,487,096	3	4,000,000	3	56,712,625	3	Rp8,745,000	3	215,688,655	12 Laporan	285,146,280	100.00%	124.25%	12	285,146,280	60.00%	27.23%		
4.01.03.1.8	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Rekomendasi Bagian Kerjasama yang dibuat	90 %	836,231,466			90 %	4,346,962,105	25.00	6,212,400	16.67	119,816,400	16.67	3,396,699,200	0.00	4,291,795,990	58.33 %	7,814,523,990	64.81%	179.77%	58.3333333	7,814,523,990	64.81%	934.49%		
4.01.03.1.9	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerjasama antar Pemerintah yang difasilitasi	10 Dokumen	836,231,466			12 Dokumen	4,166,609,699	3		3	97,544,800	3	Rp3,376,640,000	3	4,141,935,745	12 Dokumen	7,616,120,545	100.00%	182.79%	12	7,616,120,545	120.00%	910.77%		
4.01.03.1.10	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah kerjasama badan usaha/swasta yang difasilitasi	10 Dokumen	-			15 Dokumen	86,349,956	17	6,212,400	13	22,271,600	6	Rp20,059,200	9	79,143,006	45 Dokumen	127,686,206	300.00%	147.87%	45	127,686,206	450.00%	#DIV/0!		
4.01.03.1.11	Evaluasi dan Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah kerjasama yang dievaluasi	10 Dokumen	-			12 Laporan	94,002,450	3		3		3		3	70,717,239	12 Laporan	70,717,239	100.00%	75.23%	12	70,717,239	120.00%	#DIV/0!		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : dikarenakan sebagian besar kegiatan merupakan kegiatan rutin																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja : terbatasnya waktu pelaksanaan dikarenakan anggaran baru bisa dilaksanakan pada APBDP 2022																										
Rata-rata capaian kinerja (%)																										
Predikat Kinerja																										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																										
Sangat Tinggi																										
109.32%																										
123.07%																										
Sangat Tinggi																										

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah provinsi berikutnya*):						
* Diliisi oleh Kepala BAPPEDA						
BIRO ORGANISASI						
	Rata-rata capaian kinerja (%)			100.00%		
	Predikat kinerja			Sangat Rendah		
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			97.67%		
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			Sangat Rendah		
BIRO UMUM						
	Rata-rata capaian kinerja (%)			99.04%		
	Predikat kinerja			Sangat Tinggi		
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			93.65%		
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			Sangat Tinggi		
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA						
	Rata-rata capaian kinerja (%)			123.08%		
	Predikat kinerja			Sangat Tinggi		
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			86.87%		
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			Tinggi		
BIRO KESRA						
	Rata-rata capaian kinerja (%)			312.60%		
	Predikat kinerja			Sangat Tinggi		
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			90.65%		
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			Sangat Tinggi		
BIRO Perekonomian dan Admisiirasi Pembangunan						
	Rata-rata capaian kinerja (%)			109.32%		
	Predikat kinerja			Sangat Tinggi		
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			123.07%		
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			Sangat Tinggi		
BIRO PEMERINTAHAN						
	Rata-rata capaian kinerja (%)			106.44%		
	Predikat kinerja			Sangat Tinggi		
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			100.00%		
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			Tinggi		
BIRO HUKUM						
	Rata-rata capaian kinerja (%)			264.90%		
	Predikat kinerja			Sangat Tinggi		
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			88.96%		
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			Tinggi		
SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG						
	Rata-rata capaian kinerja Sekretariat Daerah (%)			100.00%		
	Predikat kinerja Sekretariat Daerah			Sangat Tinggi		
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM SEKRETARIAT DAERAH			99.14%		
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM SEKRETARIAT DAERAH			Sangat Tinggi		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : dikarenakan sebagian besar kegiatan merupakan kegiatan rutin

Faktor penghambat pencapaian kinerja : terbatasnya waktu pelaksanaan dikarenakan anggaran kegiatan baru bisa dilaksanakan pada APBDP 2022

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah provinsi berikutnya*):

* Diliisi oleh Kepala BAPPEDA

Disusun
Pangkalpinang, tanggal 2023
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dievaluasi
Pangkalpinang, tanggal 2023
KEPALA BAPPEDA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dr. Drs. NAZIARTO,SH., MH
NIP. 19640321 199103 1 009

H. FERY INSANI
NIP. 19700620 199903 1 009

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									
4.01 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4.01.01 SEKRETARIAT DAERAH									
4.01.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	NILAI SKDIP PERANGKAT DAERAH	Kota Pangkalpinang	78,5 %						
4.01.01.01.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Perencanaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PD Setda yang diturunkan tepat waktu	Kota Pangkalpinang	95%			PAD			
4.01.01.01.01.01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pangkalpinang	2 Dokumen	229.453,500	PAD		2 Dokumen	295.000.000	
4.01.01.01.01.02 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pangkalpinang	1 Dokumen	9.661,200	PAD		1 Dokumen	13.500.000	
4.01.01.01.01.03 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Pangkalpinang	1 Dokumen	9.661,200	PAD		1 Dokumen	13.500.000	
4.01.01.01.01.04 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Pangkalpinang	1 Dokumen	9.661,200	PAD		1 Dokumen	13.500.000	
4.01.01.01.01.05 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Pangkalpinang	1 Dokumen	9.661,200	PAD		1 Dokumen	13.500.000	
4.01.01.01.01.06 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pangkalpinang	2 Laporan	9.661,200	PAD		2 Dokumen	13.500.000	
4.01.01.01.01.07 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkalpinang		120.765,000	PAD		5 Dokumen	175.000.000	
4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Perekonomian dan Pembangunan yang tersusun	Kota Pangkalpinang	75%		PAD				
4.01.06.01 Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Rekomendasi Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian yang dikeluaran	Kota Pangkalpinang	65%	382.422,500	PAD				
4.01.06.01.01 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro yang dibuat	Kota Pangkalpinang	12 Dokumen	209.326,000	PAD		12 Dokumen	275.000.000	
4.01.06.01.02 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro yang dibuat	Kota Pangkalpinang	12 Dokumen	173.096,500			12 Dokumen	235.000.000	
4.01.06.01.02.02 Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Rekomendasi Pengelolaan Sumber Daya Alam yang dikeluaran	Kota Pangkalpinang	65%	257.632,000	PAD				
4.01.06.01.02.01 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelutan, dan Perikanan	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pertambangan, Kelutan, dan Perikanan yang dibuat	Kota Pangkalpinang	12 Dokumen	80.510,000			12 Dokumen	110.000.000	
4.01.06.01.02.02 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pertambangan, Lingkungan Hidup, Energi dan Air yang dibuat	Kota Pangkalpinang	10 Dokumen	88.561,000			12 Dokumen	200.000.000	
4.01.06.01.02.03 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pertambangan, Lingkungan Hidup, Energi dan Air yang dibuat	Kota Pangkalpinang	10 Dokumen	88.561,000			12 Dokumen	200.000.000	
4.01.06.01.03.01 Sub Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Rekomendasi Pengelolaan BUMD dan BLUD yang dikeluaran	Kota Pangkalpinang		220.377,000	PAD				
4.01.06.01.03.02 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah yang dibuat	Kota Pangkalpinang	5 Dokumen	72.459,000			5 Dokumen	110.000.000	
4.01.06.01.03.02.01 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Kota Pangkalpinang	1 Dokumen	32.204,000			1 Dokumen	40.000.000	
4.01.06.01.03.03 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan BUMD	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Kota Pangkalpinang		0			1 Dokumen	0	
4.01.06.01.03.04 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah yang dibuat	Kota Pangkalpinang	5 Dokumen	52.331,500			5 Dokumen	75.000.000	
4.01.06.01.03.05 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Kota Pangkalpinang	1 Dokumen	60.382,500	PAD		1 Dokumen	75.000.000	
4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Administrasi Pembangunan yang tersusun								
4.01.08.01 Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dikeluaran	Kota Pangkalpinang	75%	209.326,000	PAD				
4.01.08.01.01 Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Kota Pangkalpinang	1 Laporan	44.280,500			4 Dokumen	60.000.000	
4.01.08.01.02 Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Kota Pangkalpinang	1 Laporan	44.280,500			4 Dokumen	60.000.000	
4.01.08.01.03 Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah yang dibuat	Kota Pangkalpinang	1 Laporan	120.765,000	PAD		6 Dokumen	175.000.000	
4.01.08.01.04 Sub Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Pelaporan Pelaksanaan pembangunan Daerah yang dikeluaran	Kota Pangkalpinang		170.199,140					
4.01.08.01.02.01 Sub Kegiatan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disosialisakan		1 Dokumen	60.382,500	PAD		12 Dokumen	100.000.000	
4.01.08.01.02.02 Sub Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah		1 Laporan	65.535,140	PAD		6 Dokumen	92.000.000	
4.01.08.01.02.03 Sub Kegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah		1 Dokumen	44.280,500	PAD		6 Dokumen	60.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
BIRO ORGANISASI									
4.01 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4.01.01 SEKRETARIAT DAERAH									
4.01.02 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang penataan Organisasi		80%	1.718.767,553	PAD		80%	2.348.334,749	
4.01.02.01.01 KEGIATAN : Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Rumusan Kebijakan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan yang dikeluaran		80%	572.922,518	PAD		80%	751.702,541	
4.01.02.01.01.01 SUB KEGIATAN : Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah dokumen hasil Penataan Kelembagaan Provinsi		12 Dokumen	143.133,327	PAD		12 Dokumen	169.433,546	
4.01.02.01.01.02 SUB KEGIATAN : Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/kota		12 Dokumen	176.552,659	PAD		12 Dokumen	250.010,202	
4.01.02.01.01.03 SUB KEGIATAN : Penataan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen hasil Analisis Jabatan,Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan		12 Dokumen	253.236,532	PAD		12 Dokumen	332.258,793	
4.01.02.01.02.01 KEGIATAN : Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Rumusan Kebijakan Akuntabilitas Kinerja,Budaya Kerja, Reformasi Birokrasi, Tata Laksana Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dikeluaran		80%	1.145.845,035	PAD		80%	1.596.632,208	
4.01.02.01.02.02 SUB KEGIATAN : Pembinaan Pelaksanaan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan RR		12 Dokumen	205.230.518	PAD		12 Dokumen	230.143.110	

		Jumlah Dokumen hasil pengelolaan Kinerja	12 Dokumen	209.190.740	PAD	12 Dokumen	328.206.208
4.01.02.1.02.02	SUB KEGIATAN : Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	12 Dokumen	159.892.000	PAD	12 Dokumen	328.206.208
4.01.02.1.02.03	SUB KEGIATAN : Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	27 Laporan	207.800.000	PAD	27 Laporan	228.590.780
4.01.02.1.02.04	SUB KEGIATAN : Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	33 Dokumen	213.961.717	PAD	33 Dokumen	85.012.090
4.01.02.1.02.05	SUB KEGIATAN : Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah dokumen hasil fasilitasi peningkatan Pelayanan Publik	12 Dokumen	358.960.800	PAD	12 Dokumen	316.680.020

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								
4.01.04.	PROGRAM KEGIATAN : Kebijakan Daerah dibidang Kesejahteraan Rakyat yang tersusun	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Kesejahteraan Rakyat yang tersusun	pangkalpinang	80%	62,036,617,400	PAD		80%	84,651,236,400
4.01.04.1.01	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Rekomendasi Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual yang dikeluarkan	pangkalpinang	85%	10,207,320,116	PAD		85%	13,946,158,368
4.01.04.1.01.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Umlah Bahan Usulan Rekomendasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual yang dibuat	pangkalpinang	100 unit	8,753,141,451	PAD		100 unit	11,959,328,775
4.01.04.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual yang dibuat	pangkalpinang	60 lembaga	1,454,178,665	PAD		60 lembaga	1,986,829,623
4.01.04.1.02	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Rekomendasi Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang dikeluarkan	pangkalpinang	85%	51,670,376,051	PAD		85%	70,487,945,525
4.01.04.1.02.01	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan yang dibuat	pangkalpinang	70 dokumen	9,526,352,370	PAD		80 dokumen	11,889,857,811
4.01.04.1.02.02	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan yang dibuat	pangkalpinang	60 dokumen	79,982,101	PAD		70 dokumen	109,278,737
4.01.04.1.02.03	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial yang dibuat	pangkalpinang	170 dokumen	42,064,041,580	PAD		180 dokumen	58,488,808,977
4.01.04.1.03	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Rekomendasi Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang dikeluarkan	pangkalpinang	85%	158,921,233	PAD		85%	217,132,477
4.01.04.1.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata yang dikeluarkan	pangkalpinang	12 Dokumen	67,914,962	PAD		12 Dokumen	92,791,527
4.01.04.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan yang dibuat	pangkalpinang	12 Dokumen	46,725,771	PAD		12 Dokumen	60,500,000
4.01.04.1.03.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	•Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang dibuat	pangkalpinang	12 Dokumen	44,280,500	PAD		12 Dokumen	63,840,950

BIRO PEMERINTAHAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								
4.01.03	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang tersusun	Kab/kota	75%	Rp 3,647,014,567.82	PAD		75%	Rp 11,740,625,309.00
4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Rumusan kebijakan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan yang dikeluarkan	Kab/kota	75%	Rp 1,002,749,753.85	PAD		75%	Rp 1,486,273,148.00
4.01.03.1.01.01	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan (dokumen)	Kab/kota	25 Dokumen	Rp 175,511,800.00	PAD		25 Dokumen	Rp 365,000,000.00
4.01.03.1.01.02	Facilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum (dokumen)	Kab/kota	2 Dokumen	Rp 241,530,000.00	PAD		3 Dokumen	Rp 350,000,000.00
4.01.03.1.01.03	Facilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penataan Wilayah (dokumen)	Kab/kota	3 Dokumen	Rp 585,707,953.85	PAD		4 Dokumen	Rp 771,273,148.00
4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Rumusan kebijakan Otonomi Daerah yang dikeluarkan	Kab/kota	75%	Rp 2,165,230,313.96	PAD		75%	Rp 2,854,352,161.00
4.01.03.1.02.01	Facilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Kab/kota	4 Dokumen	Rp 692,216,915.31	PAD		4 Dokumen	Rp 945,768,981.00
4.01.03.1.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Kab/kota	3 Dokumen	Rp 1,006,375,000.00	PAD		3 Dokumen	Rp 1,300,000,000.00
4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab/kota	4 Laporan	Rp 466,638,398.65	PAD		4 Laporan	Rp 608,583,180.00
4.01.03.1.03.03	Facilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Rumusan kebijakan Facilitasi Kerjasama Daerah yang dikeluarkan	Kab/kota	75%	Rp 479,034,500.00	PAD		75%	Rp 7,400,000,000.00
4.01.03.1.03.01	Facilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Kab/kota	2 Dokumen	Rp 36,229,500.00	PAD		2 Dokumen	Rp 6,500,000,000.00
4.01.03.1.03.02	Facilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Kab/kota	17 Dokumen	Rp 120,765,000.00	PAD		20 Dokumen	Rp 300,000,000.00
4.01.03.1.03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Kab/kota	6 Laporan	Rp 322,040,000.00	APBD		6 Laporan	Rp 600,000,000.00

BIRO UMUM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			83%	Rp 99,646,703,000	PAD		84%	Rp 121,545,183,000.00
01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			83%	Rp 48,616,000,000	PAD		84%	Rp 51,555,431,894.00

01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	Pangkalpinang	285	48,525,000,000	PAD		292	Rp 51,398,615,894.00
01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	Pangkalpinang	0		PAD		0	
01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	Pangkalpinang	1	91,000,000	PAD		1	Rp 121,000,000.00
01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (dokumen)	Pangkalpinang	3		PAD		3	
01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (laporan)	Pangkalpinang	18		PAD		18	Rp 35,816,000.00
01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			83%	260,000,000	PAD		84%	Rp 215,622,000.00
01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi/Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	Pangkalpinang	0		PAD		0	
01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	Pangkalpinang	0		PAD		0	
01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	Pangkalpinang	0		PAD		0	
01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	Pangkalpinang	12	260,000,000	PAD		12	Rp 215,622,000.00
01.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	Pangkalpinang	0		PAD		0	
01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					PAD		84%	Rp 10,000,000.00
01.1.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (dokumen)	Pangkalpinang			PAD		1	Rp 3,500,000.00
01.1.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (laporan)	Pangkalpinang			PAD		1	Rp 3,500,000.00
01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (laporan)	Pangkalpinang			PAD		1	Rp 3,000,000.00
01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			83%	871,000,000	PAD		84%	Rp 1,222,100,000.00
01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (unit)	Pangkalpinang	0	-	PAD		0	
01.1.05.02	Pengadaan Pakaihan Dinas Beserta Atribut Kelengkапannya	Jumlah Paket Pakaihan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (paket)	Pangkalpinang	1	540,000,000	PAD		1	Rp 605,000,000.00
01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	Pangkalpinang			PAD		0	
01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (dokumen)	Pangkalpinang			PAD		0	
01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)	Pangkalpinang			PAD		0	
01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	Pangkalpinang	20	120,000,000	PAD		20	Rp 181,500,000.00
01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi peraturan Perundang-Undangan (orang)	Pangkalpinang	20	90,000,000	PAD		20	Rp 181,500,000.00
01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	Pangkalpinang	10	121,000,000	PAD		10	Rp 254,100,000.00
01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			83%	16,116,400,000	PAD		84%	Rp 20,254,100,000.00
01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	Pangkalpinang	12	641,050,000	PAD		12	Rp 786,500,000.00
01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	Pangkalpinang	12	165,000,000	PAD		12	Rp 242,000,000.00
01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	Pangkalpinang	1	189,000,000	PAD		1	Rp 229,900,000.00
01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	Pangkalpinang	12	64,350,000	PAD		12	Rp 108,900,000.00
01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	Pangkalpinang	12	357,000,000	PAD		12	Rp 544,500,000.00
01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	Pangkalpinang	12	125,000,000	PAD		12	Rp 217,800,000.00
01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (paket)	Pangkalpinang	12	875,000,000	PAD		12	Rp 1,028,500,000.00
01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	Pangkalpinang	12	7,700,000,000	PAD		12	Rp 9,836,038,273.00
01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Pangkalpinang	12	6,000,000,000	PAD		12	Rp 7,260,000,000.00
01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	Pangkalpinang			PAD		0	
01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)	Pangkalpinang			PAD		0	
01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			83%	5,058,172,000	PAD		84%	Rp 8,975,477,500.00
01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit)	Pangkalpinang	3	702,000,000	PAD		3	Rp 1,089,000,000.00
01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	Pangkalpinang	4	964,572,000	PAD		4	Rp 3,968,800,000.00
01.1.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (unit)	Pangkalpinang	3	33,000,000	PAD		3	Rp 36,300,000.00
01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (paket)	Pangkalpinang	3	352,000,000	PAD		3	Rp 389,620,000.00
01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	Pangkalpinang	50	1,400,000,000	PAD		55	Rp 1,628,357,500.00
01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (unit)	Pangkalpinang	5	28,600,000	PAD		5	Rp 48,400,000.00
01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	Pangkalpinang	1	475,000,000	PAD		1	Rp 544,500,000.00
01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	Pangkalpinang	3	793,000,000	PAD		3	Rp 891,770,000.00
01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	Pangkalpinang	3	310,000,000	PAD		3	Rp 378,730,000.00
01.1.08.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			83%	13,336,500,000	PAD		84%	Rp 17,352,005,000.00
01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	Pangkalpinang	12	33,000,000	PAD		12	Rp 49,005,000.00
01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	Pangkalpinang	12	3,700,000,000	PAD		12	Rp 5,445,000,000.00

01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	Pangkalpinang	12	1,875,000,000	PAD		12	Rp 2,420,000,000.00
01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	Pangkalpinang	12	7,728,500,000	PAD		12	Rp 9,438,000,000.00
01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			83%	8,945,380,000	PAD		84%	Rp 11,573,952,500.00
01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas/Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (unit)	Pangkalpinang	16	898,680,000	PAD		16	Rp 1,086,223,655.00
01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	Pangkalpinang	83	2,400,000,000	PAD		88	Rp 3,186,981,672.00
01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)	Pangkalpinang	120	128,700,000	PAD		140	Rp 217,800,000.00
01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	Pangkalpinang	55	758,000,000	PAD		60	Rp 1,084,070,151.00
01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	Pangkalpinang	6	3,452,000,000	PAD		6	Rp 4,372,600,722.00
01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	Pangkalpinang	6	1,058,000,000	PAD		6	Rp 1,323,776,300.00
01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	Pangkalpinang	4	250,000,000	PAD		4	Rp 302,500,000.00
01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			82%	1,605,000,000	PAD		83%	Rp 1,881,078,458.00
01.1.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (orang/bulan)	Pangkalpinang	14	224,000,000	PAD		14	Rp 168,928,458.00
01.1.11.02	Penyediaan Pakaiian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaiian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (paket)	Pangkalpinang	2	93,500,000	PAD		2	Rp 102,850,000.00
01.1.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (orang)	Pangkalpinang	6	37,500,000	PAD		6	Rp 96,800,000.00
01.1.11.04	Penyediaan Dana Peningkatan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Peningkang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (orang/bulan)	Pangkalpinang	12	1,250,000,000	PAD		12	Rp 1,512,500,000.00
01.1.12	Fasilitasi Keruhamongan Sekretariat Daerah			83%	2,338,251,000	PAD		84%	Rp 2,305,337,375.00
01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (paket)	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (paket)	Pangkalpinang	12	966,900,000	PAD		12	Rp 1,063,590,000.00
01.1.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (paket)	Pangkalpinang	12	233,351,000	PAD		12	Rp 256,686,375.00
01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (paket)	Pangkalpinang	12	1,138,000,000	PAD		12	Rp 985,061,000.00
01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan			82%	1,200,000,000	PAD		83%	Rp 2,286,900,000.00
01.1.13.01	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan (dokumen)	Pangkalpinang			PAD		12	Rp 157,300,000.00
01.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi pimpinan (laporan)	Pangkalpinang	12	1,200,000,000	PAD		12	Rp 1,403,600,000.00
01.1.13.03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan (laporan)	Pangkalpinang			PAD		12	Rp 726,000,000.00
01.1.14	Fasilitasi Keprotokolahan			82%	1,300,000,000	PAD		83%	Rp 3,913,140,000.00
01.1.14.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi pelaksanaan Acara (laporan)	Pangkalpinang	12	100,000,000	PAD		12	Rp 1,210,000,000.00
01.1.14.02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (laporan)	Pangkalpinang			PAD		12	Rp 968,000,000.00
01.1.14.03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (laporan)	Pangkalpinang	12	1,200,000,000	PAD		12	Rp 1,735,140,000.00

BIRO HUKUM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								
4.01.01	Program Koordinasi dan Fasilitasi Hukum	presentase usulan kebijakan daerah dibidang hukum yang tersusun	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	90%	Rp 1,069,953,363.00	PAD		95%	Rp 1,461,866,476.00
4.01.05.1.01	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Presentase rumusan kebijakan penataan perundang-undangan Pemerintah Provinsi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	90%	Rp 931,843,691.00	PAD		95%	Rp 1,267,976,485.00
4.01.05.1.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang disusun	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	40 Dokumen	Rp 720,379,737.00	PAD		40 Dokumen	Rp 984,917,711.00
4.01.05.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang disusun	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	250 Dokumen	Rp 53,332,442.00	PAD		250 Dokumen	Rp 58,665,686.00
4.01.05.1.01.03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang didokumentasikan dan dikelola	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	115 Dokumen	Rp 113,131,512.00	PAD		150 Dokumen	Rp 164,044,663.00
4.01.05.1.01.04	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang difasilitasi dan dievaluasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	80 Dokumen	Rp 45,000,000.00	PAD		80 Dokumen	Rp 60,348,425.00
4.01.05.1.02	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Rekomendasi penerapan kebijakan yang menjamin kepastian dan keadilan hukum Pemda dan Masyarakat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	90%	Rp 138,109,672.00	PAD		95%	Rp 193,889,991.00
4.01.05.1.02.01	Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah masalah hukum yang diselesaikan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2 kasus	Rp 99,821,181.00	PAD		2 kasus	Rp 139,672,651.00
4.01.05.1.02.02	Sub kgiatan Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah masalah non Litigasi dan HAM yang diselesaikan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5 Dokumen	Rp 38,288,491.00	PAD		5 Dokumen	Rp 54,217,340.00